



PEMERINTAH KOTA PALOPO
INSPEKTORAT
Jalan Andi Mas Jaya No. 19 Telp. (0471) 325398
PALOPO

REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH KOTA PALOPO
TAHUN ANGGARAN 2020



Nomor : 700/28/Inspk/III/2021
Tanggal : 29 Maret 2021



PEMERINTAH KOTA PALOPO
I N S P E K T O R A T
Jalan Andi Masjaya No. 19 Telp. (0471) 325398
P A L O P O

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KOTA PALOPO
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Palopo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palopo, 29 Maret 2021



Inspektur,

Drs. H. Asir MM

Rangka: Pembina Utama Madya

NIP : 196305011992031015



PEMERINTAH KOTA PALOPO
INSPEKTORAT
Jalan Andi Masjaya No. 19 Telp. (0471) 325398
PALOPO

Palopo, 29 Maret 2021

K e p a d a

Yth. Walikota Palopo
di -

P a l o p o . -

Nomor :700/ 28/InspK/III/2021
Sifat :Rahasia
Lampiran :-
Perihal : Hasil Reviu Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kota Palopo Tahun 2020

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo untuk Tahun 2020 , sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu

Tim Inspektorat Kota Palopo telah mereviu Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Palopo untuk Tahun 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Palopo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja Pemerintah Kota Palopo

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Surat Tugas Inspektur Kota Palopo Nomor:094/ 049 / InspK./III/2021 , tanggal 18 Maret 2021

3. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo untuk Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan mulai tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 01 April 2021

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

- Tujuan reviu adalah
 - a. Membantu Penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palopo
 - b. untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Pemerintah Kota Palopo, sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas
- Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja (LKj) Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020

6. Tim Reviu :

- Penanggung Jawab : Inspektur Kota Palopo
- Supervisor : Baharuddin, SP
- Pengendali Tekhnis : H. Karyawan A. Ihsan
- Ketua Tim : Drs. Syarifuddin, M.SI
- Anggota :
 - Herlina, SE
 - Hamsir, SE
 - Dewi Anriani, SE
 - A. Raju, SE
 - Habel Basongan, S.AN

7. Simpulan dan Rekomendasi

A. Simpulan

I. Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja(LKj) Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan Kinerja(LKj) Telah Menampilkan data Penting Instansi Pemerintah Kota Palopo dalam Bab I Pendahuluan

antara lain : Gambaran umum kota Palopo (Luas dan Batas Wilayah administrative, Jumlah Penduduk, kondisi topografis, ,struktur organisasi perangkat Daerah Sesuai Perda nomor 8 tahun 2016, yang menetapkan 29 Dinas, 7 Badan, 2 Sekretariat, 2 Rumah Sakit Umum Daerah, 9 Kecamatan), Data jumlah PNS.

- 2) Laporan Kinerja(LKj) telah menyajikan Informasi target Kinerja.

Telah di sajikan di Bab II Perencanaan Kinerja yang terdiri dari 5 (lima) tujuan, 11 sasaran dan 19 (Sembilan belas) Indikator kinerja.

- 3) Laporan Kinerja(LKj) telah menyajikan capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Palopo untuk Tahun 2020, telah disajikan di Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 4) Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan

- 3) Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja, berupa surat edaran, tetapi belum di dukung dengan adanya SOP.

- 7) Dalam Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Palopo tahun 2020 merupakan gabungan dari unit kerja/Organisasi Perangkat Daerah(OPD).

III. Subtansi

Kesimpulan terhadap Subtansi laporan kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja yang telah ditanda tangani oleh Walikota Palopo.
- 2) Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah selaras dengan Renstra /RPJMD Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018-2023;
- 3) Target Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.
- 4) Indikator Kinerja Utama (IKU) dibuat secara formal; dan telah sesuai dengan dokumen IKU yang di tetapkan.
- 5) Terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, tetapi belum ada perbandingan dengan, capaian Kinerja beberapa tahun sebelumnya, dan standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat;
- 6) Laporan Kinerja sudah menyajikan upaya perbaikan ke depan.
- 7) IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan dan sasaran

- 8) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) telah SMART.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil reviu oleh Tim Inspektorat Kota Palopo atas Laporan Kinerja (Lkj) Pemerintah Kota Palopo tahun 2020, bahwa beberapa Catatan hasil Reviu, telah tindaklanjuti oleh Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palopo. Selanjutnya direkomendasikan kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palopo , bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja agar:

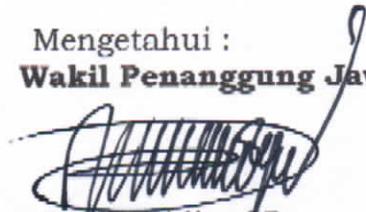
1. Dalam hal Format Laporan Kinerja, agar:
Laporan Kinerja disajikan dengan lampiran selain Perjanjian Kinerja, yang mendukung informasi pada badan laporan;
2. Dalam hal Mekanisme Penyusunan, agar :
Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja didukung dengan adanya SOP. Serta adanya penetapan penanggung jawab pengumpulan data di setiap Unit kerja/ Organisasi Perangkat Daerah.
3. Dalam hal Substansi, agar:
 - Dalam Penyusunan Laporan Kinerja, agar menyajikan perbandingan Capaian Kinerja tahun yang dilaporkan, dengan beberapa tahun sebelumnya
 - Untuk lebih meyakinkan, dapat menyajikan data perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

IV. Apresiasi

Tim Reviu Inspektorat Kota Palopo mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020, sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kegiatan Reviu .

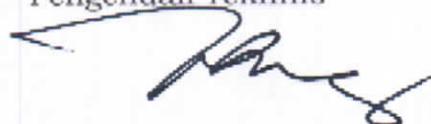
Demikian laporan hasil reviu ini disampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

Mengetahui :
Wakil Penanggung Jawab



Baharuddin, SP
Nip. 197112011998031014

Pengendali Tekhnis



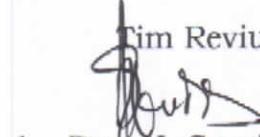
H. Karyawan, A. Ihsan
Nip. 196204231986031019

Penanggung Jawab
Inspektur,

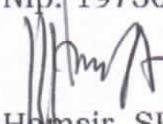


Drs. H. Asir MM
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP. 196305011992031015

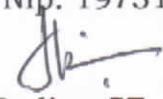
Tim Reviu



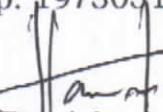
1. Drs. H. Syarifuddin, M.Si
Nip. 197303041992021001



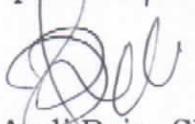
2. Hamsir, SE
Nip. 197310012008042001



3. Herlina, SE
Nip. 197303152005022002



4. Dewi Anriani, SE
Nip. 197501262000122005



5. Andi Raju, SE
Nip. 19752909200901200

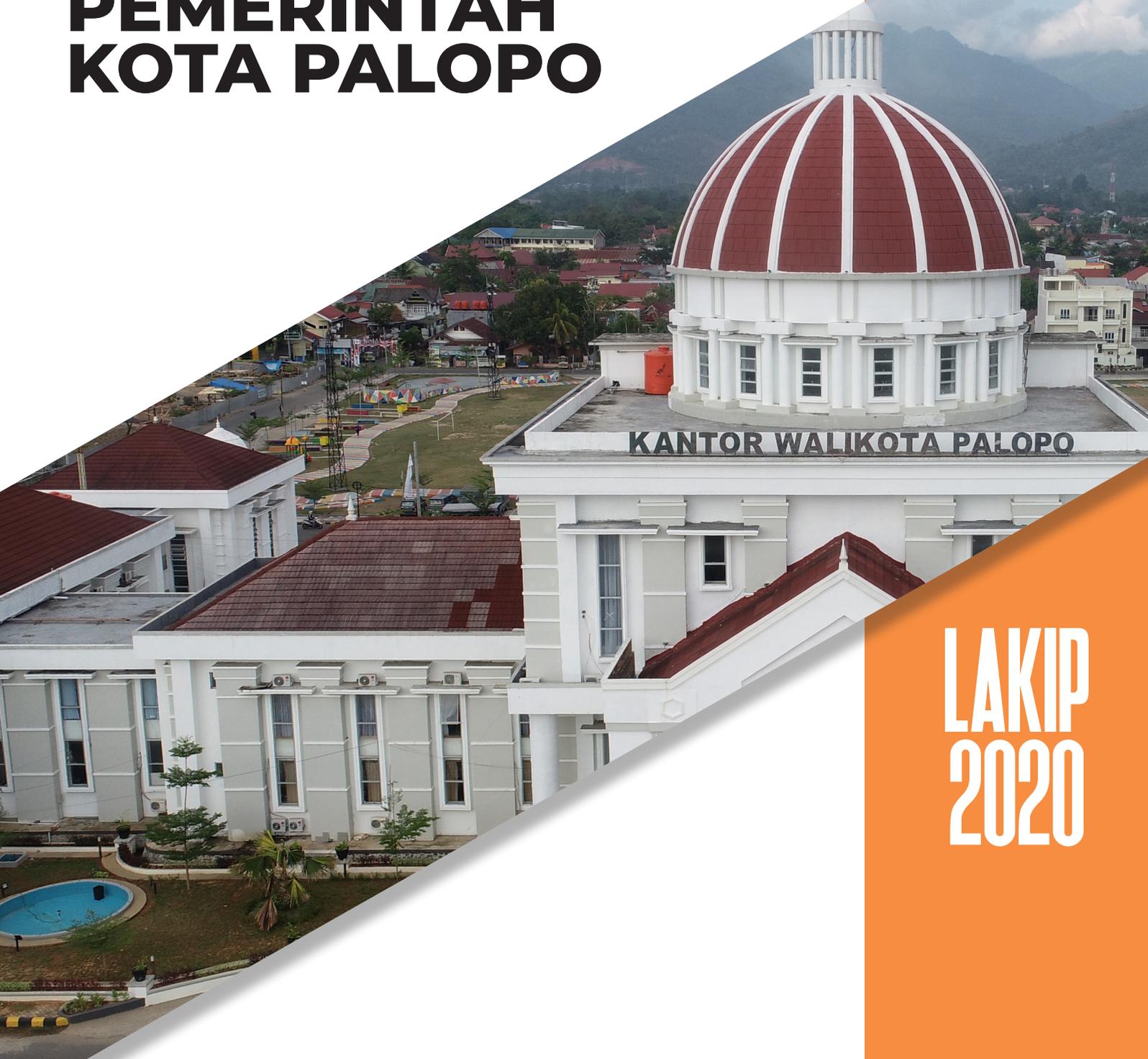


6. Habel Basongan, S.AN
Nip. 198007102007011010

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH KOTA PALOPO



PEMERINTAH
KOTA PALOPO



LAKIP
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020 dapat diselesaikan sebagai perwujudan pertanggungjawaban tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Palopo. Hal ini juga sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menuju terciptanya Good Governance dan Clean Government. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Palopo tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020 ini bermanfaat sehingga dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun mendatang.

Palopo, Maret 2021

WALIKOTA PALOPO,



Drs. H.M.JUDAS AMIR, MH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Palopo telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 yang mengacu kepada Pedoman Penyusunan LAKIP yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang berisikan tentang keberhasilan, kegagalan, kegiatan yang belum sempat dilaksanakan, faktor pendukung keberhasilan dan hambatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palopo.

Tahun 2020 adalah pelaksanaan RPJMD Pemerintah Kota Palopo tahun kedua, dalam upaya pencapaian tujuan secara umum melalui indikator-indikator sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018 - 2023. Kinerja yang diukur dalam LAKIP ini didasarkan atas dokumen RPJMD tahun 2018 - 2023, Renstra dan Penetapan Kinerja Daerah Kota Palopo tahun 2020. Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Palopo berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari persentase capaian hasil kinerja sasaran, yaitu dengan tingkat capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar **78,93%** yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur serta teruji kelayakannya.

Dengan mempedomani Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Palopo tentang Indikator Kinerja Utama, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut :

- Misi I terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja utama :
Capaian kinerja seluruh indikator kinerja adalah sangat tinggi atau melampaui target yang ditetapkan
- Misi II terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 5 indikator kinerja :
Capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja adalah sangat tinggi dan 1 indikator berkinerja sangat rendah
- Misi III terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja :
Capaian kinerjanya, sebanyak 2 indikator kinerja kategori Sangat Tinggi (melampaui target), 1 indikator kinerja kategori Tinggi dan 1 indikator lainnya kategori sedang
- Misi IV terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja :
Capaian kinerja 2 indikator adalah kategori sangat tinggi dan satu indikator lainnya berkategori sangat rendah
- Misi V terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja :

Capaian kinerjanya, sebanyak 1 indikator kategori Tinggi dan 2 indikator lainnya kategori sangat rendah

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 11 (sebelas) sasaran yang mencakup 19 (sembilan belas) indikator sasaran, diketahui bahwa :

- ❖ 12 indikator atau 63% Pencapaian Kinerjanya Sangat Tinggi,
- ❖ 2 indikator atau 10,4% Pencapaian Kinerjanya Tinggi,
- ❖ 1 indikator atau 5,2% Pencapaian Kinerjanya Sedang,
- ❖ 0 indikator atau 0% Pencapaian Kinerjanya Rendah.
- ❖ 4 indikator atau 21% pencapaiannya sangat rendah

Berkenaan dengan ketercapaian indikator kinerja utama terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 11 sasaran yang mencakup 19 indikator kinerja, diketahui bahwa 12 indikator kinerja atau 63% mencapai kategori **Sangat Tinggi**, 2 indikator sasaran atau 10,4% kategori **Tinggi**, 1 indikator sasaran atau 5,2% memperoleh kategori **Sedang**, 0 indikator sasaran atau 0,00% **Rendah** , dan 4 indikator sasaran atau 21% kinerjanya **Sangat Rendah**. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **78,93%** atau bermakna Tinggi. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2020 **“TINGGI”**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Gambaran Umum Kota Palopo.....	3
1.3.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif	3
1.3.2 Jumlah Penduduk	5
1.3.3 Kondisi Topografi.....	6
1.4 Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo	7
1.4.1 Sumber Daya Aparatur	8
1.5 Sasaran dan Permasalahan Pembangunan Daerah	10
1.5.1 Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2020.....	13
1.5.6 Sistematisasi Penyusunan	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	15
2.2 Perjanjian Kinerja	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	27
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020	33
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020	59
BAB IV. PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip – prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai – nilai akuntabilitas menuju good governance yakni pemerintahan Kota Palopo yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dapat pula digunakan sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada-tahun berikutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020 yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 40 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2019. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2019 merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh gerak penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kota Palopo yang tentunya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2018-2023. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020 ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2020 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian

kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Palopo selama Tahun Anggaran 2020;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Palopo pada Tahun 2020;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Palopo di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Palopo dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

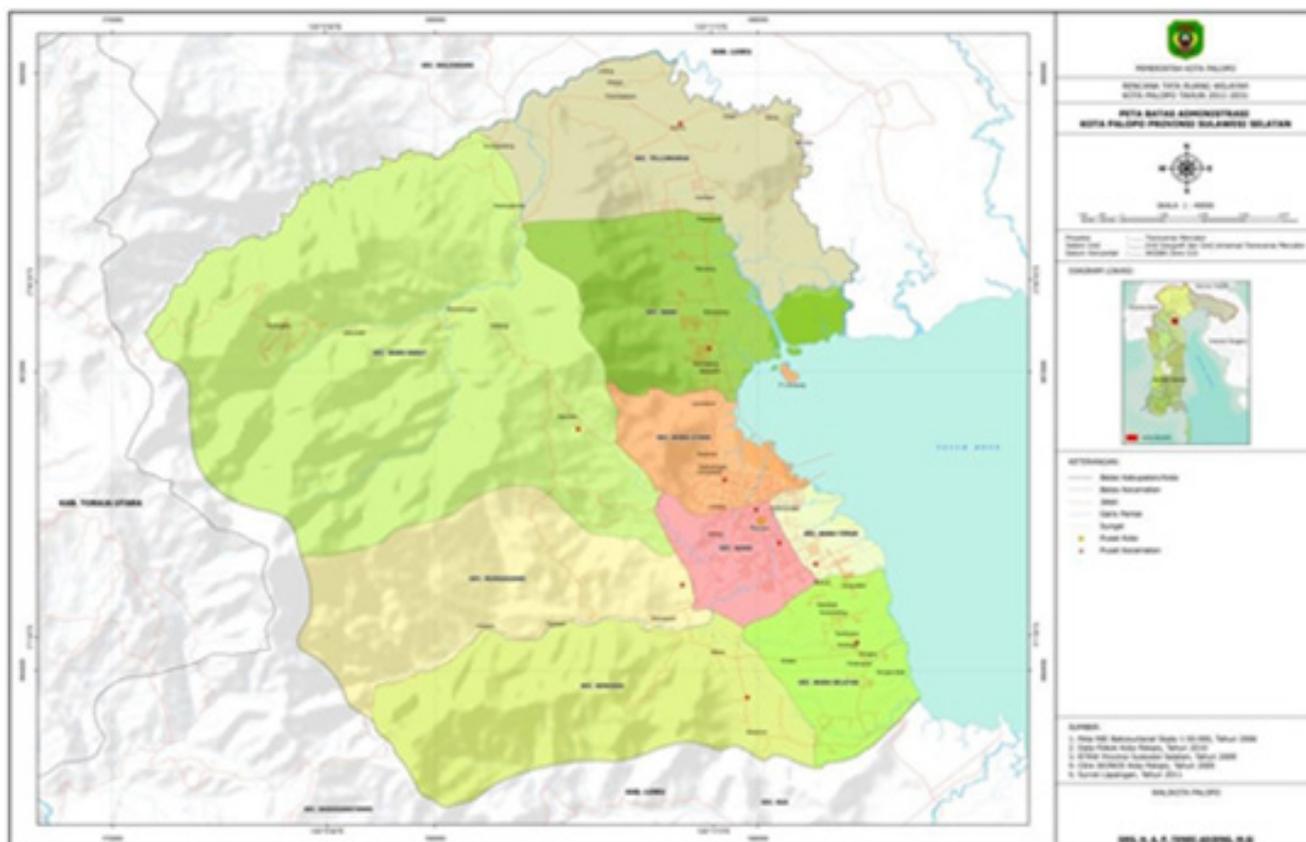
1.3. GAMBARAN UMUM KOTA PALOPO

1.3.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif

Secara administratif, Kota Palopo memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu;
- Sebelah Timur dengan Teluk Bone;
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara.

Peta Administratif



Secara geografis, Kota Palopo terletak antara 2°53'.15" - 3°04'.08" Lintang Selatan dan 120°03'.10" -120°14'.34" Bujur Timur dengan luas wilayah ± 247,52 km² yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km² dan yang tersempit

adalah kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km². Adapun luas wilayah menurut kecamatan di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel di berikut :

Luas wilayah dan Pembagian Wilayah menurut Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase (%)
1.	Wara Selatan	4	10,66	4,31
2.	Sendana	4	37,09	14,98
3.	Wara	6	11,49	4,64
4.	Wara Timur	7	12,08	4,88
5.	Mungkajang	4	53,80	21,74
6.	Wara Utara	6	10,58	4,27
7.	Bara	5	23,35	9,43
8.	Telluwana	7	34,34	13,87
9.	Wara Barat	5	54,13	21,87
Jumlah		48	247,52	100,00

Sumber : BPS Kota Palopo

1.3.2 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya yang penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Bukan hanya dengan jumlah yang besar tetapi kualitas yang baik akan lebih berguna dalam meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara umum. Jumlah penduduk Kota Palopo Tahun 2019 berdasarkan data Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kota Palopo adalah 181,438 jiwa. Penyebaran penduduk di setiap kecamatan masih belum merata. Kecamatan Wara Timur merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 38,192 jiwa dan Kecamatan Sendana merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yaitu sebanyak 7,233 jiwa.

Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan per km ²
1.	Wara Selatan	15.773	10,66	1.479
2.	Sendana	7.233	37,09	195
3.	Wara	32.412	11,49	2.820
4.	Wara Timur	38.192	12,08	3.161
5.	Mungkajang	9.305	53,80	173
6.	Wara Utara	21.194	10,58	2003
7.	Bara	29.483	23,35	1263
8.	Telluwana	16.080	34,34	468
9.	Wara Barat	11.766	54,13	217
Jumlah		181.438	247,52	733

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.3.3 Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kota Palopo meliputi ketinggian antara 0 – 1.500 m dari permukaan air laut (dpl) dengan tingkat kemiringan lereng antara 0–2 %, 2–15 %, 15–40 %, dan > 40 %. Adapun tingkat kemiringan lereng Kota Palopo berdasarkan luas wilayahnya yang terluas adalah wilayah dengan tingkat kemiringan lereng 2

– 15 % dengan luas 76,677 Km² sedangkan tingkat kemiringan lereng dengan luas wilayah terkecil adalah tingkat kemiringan lereng 15 % - 40 % dengan luas wilayah 57,989 Km². Untuk lebih jelasnya, luas wilayah berdasarkan tingkat kemiringan lereng Kota Palopo menurut kecamatan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Kemiringan Lereng Kota Palopo Menurut Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Tingkat Kemiringan Lereng (km ²)			
			0-2 %	2-15 %	15-40 %	> 40 %
1.	Wara Selatan	10,66	7,462	1,066	2,132	-
2.	Sendana	37,09	5,564	-	22,254	9,272
3.	Wara	11,49	11,490	-	-	-
4.	Wara Timur	12,08	12,080	-	-	-
5.	Mungkajang	53,80	2,690	-	16,140	34,97
6.	Wara Utara	10,58	6,348	2,116	2,116	-
7.	Bara	23,35	7,005	2,335	14,010	-
8.	Tellu Wanua	34,34	24,038	3,434	6,868	-
9.	Wara Barat	54,13	-	-	5,413	48,717
Jumlah		247,52	76,677	8,951	68,933	57,989

Sumber : BPS Kota Palopo

Kondisi ketinggian, bervariasi ini menunjukkan 62,85 % dari total luas wilayah merupakan daerah ketinggian 0-500 mdl, 24,76 % terletak di ketinggian

501-1.000 mdl, dan sekitar 12,39 % terletak diatas ketinggian lebih dari 1.000 mdl. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Kondisi Topografi Kota Palopo Menurut Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Tingkat Ketinggian Daerah (Mdl)				
			0 – 25	26–100	101-500	501-1000	> 1000 %
1.	Wara Selatan	10,66	7,462	1,066	-	2.132	-
2.	Sendana	37,09	5,564	-	22,254	9.272	-
3.	Wara	11,49	11,490	-	-	-	-
4.	Wara Timur	12,08	12,080	-	-	-	-
5.	Mungkajang	53,80	2,690	-	16,140	13.450	21.520
6.	Wara Utara	10,58	6,348	2,116	2,116	-	-
7.	Bara	23,35	7,005	2,335	14,010	-	-
8.	Tellu Wanua	34,34	24,038	3,434	6,868	-	-
9.	Wara Barat	54,13	-	-	5,413	35.184	13.533
Jumlah		247,52	8,17	8,951	66,801	60.038	35.053

Sumber : BPS Kota Palopo

Keadaan permukaan tanah bergunung dan berbukit terutama pada sebelah Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja Utara. Daerah dengan kondisi topografi relatif rendah dan berbukit pada bagian Utara. Sedangkan bagian Timur merupakan daerah pantai

yang membujur dari Utara ke Selatan dengan panjang pantainya kurang lebih 25 Km. Bagian Selatan berbukit terutama bagian Barat, sedangkan bagian lainnya merupakan dataran rendah yang datar dan bergelombang.

1.4 SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PALOPO

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kota Palopo;
2. Sekretariat DPRD Kota Palopo;
3. Inspektorat Daerah;
4. Badan Daerah (7 Badan) :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Dinas Daerah (29 Dinas) :
 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 7. Dinas Tenaga Kerja;
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Dinas Perdagangan;
 10. Dinas Perindustrian;
 11. Dinas Kebudayaan;
 12. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 13. Dinas Pemuda dan Olah raga;
 14. Dinas Pendidikan;
 15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 16. Dinas Perhubungan;
 17. Dinas Pertanahan;
 18. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 19. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 20. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;
 21. Dinas Ketahanan Pangan;
 22. Dinas Komunikasi & Informatika;
 23. Dinas Persandian & Statistik;
 24. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 25. Satuan Polisi Pamong Praja;
 26. Dinas Kearsipan;
 27. Dinas Perpustakaan;
 28. Dinas Transmigrasi;
 29. Dinas Perikanan
6. Rumah Sakit Umum Daerah :
 1. RSUD Sawerigading
7. Kecamatan (9 Kecamatan) :
 1. Kecamatan Wara;
 2. Kecamatan Wara Utara;
 3. Kecamatan Wara Selatan;
 4. Kecamatan Wara Barat;
 5. Kecamatan Wara Timur;

6. Kecamatan Bara;
7. Kecamatan Mungkajang;
8. Kecamatan Sendana;
9. Kecamatan Telluwanua

1.4.1 SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah. Jumlah Pegawai yang ada di Pemerintah Kota Palopo seluruhnya sebesar 4.507 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

No.	Instansi/Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat Daerah	2	45	83	24	154
2	Sekretariat KPU	-	-	1	1	2
3	Sekretariat DPRD	-	16	22	4	42
4	RSUD	4	31	343	96	430
5	Inspektorat	-	3	29	15	47
6	Badan Daerah	1	44	166	32	243
7	Dinas Daerah	4	275	1833	883	2996
8	Kecamatan	-	33	101	10	144
9	Kelurahan	2	107	306	-	409
Jumlah		13	550	2.840	1.065	4507

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo

1.5. SASARAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH



S.1 MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN MASYARAKAT

- Belum meratanya pemenuhan sarana prasarana serta SDM kependidikan dalam mendukung akses/partisipasi pada pendidikan dasar, pemenuhan layanan minimal pendidikan dasar, dan peningkatan kualitas pendidikan dasar.



S.2 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

- Belum meratanya pemenuhan sarana prasarana serta SDM kesehatan dalam mendukung akses masyarakat atas layanan kesehatan, pemenuhan pelayanan minimal kesehatan, pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat serta belum optimalnya penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat.



S.3 MENINGKATNYA DERAJAT KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

- Stagnasi produksi dan produktivitas serta daya saing produk sektor perekonomian yang banyak menyerap tenaga kerja yakni pertanian tanaman pangan dan perkebunan serta perikanan.
- Belum optimalnya perkembangan sektor perekonomian sekunder dan tersier terutama perdagangan, industri dan jasa perkotaan.
- Belum optimalnya perkembangan investasi dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk pada sektor ekonomi kreatif.
- Rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja karena terbatasnya akses untuk meningkatkan keterampilan kerja dan etos kewirausahaan.



S.4 MENINGKATNYA KAPASITAS DAN LAYANAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

- Terbatasnya kemampuan dalam pemeliharaan jalan dan jembatan.
- Kurang berkembangnya kesadaran masyarakat atas penataan lingkungan permukiman dan perumahan.



S.5 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS INFRASTRUKTUR STRATEGIS

- Belum efektifnya penertiban penggunaan terminal dan pelabuhan



S.6 MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- Bertambahnya intensitas konversi lahan pertanian menjadi peruntukan non pertanian serta perambahan atas lokasi hutan.
- Adanya tekanan ekologi dan sosial pada kawasan pesisir akibat perluasan pemukiman dan perkembangan pusat aktivitas perekonomian.
- Kurang efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya dalam RTRW.
- Adanya ancaman pencemaran air serta ketersediaan sustainabilitas pasokan sumber air bersih masyarakat
- Luas dan kualitas Lahan Terbuka Hijau dan ruang publik belum seimbang dengan pertumbuhan dan kebutuhan serta kondisi penduduk Kota Palopo.



S.7

MENINGKATNYA KUALITAS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- Sumber Daya Aparatur yang menyelenggarakan pemerintahan yang belum memadai
- Kualitas dan ketersediaan data dan informasi pembangunan serta Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) belum optimal, termasuk pada tingkat PD.
- Tingkat kesesuaian dan kualitas perencanaan kinerja tingkat kota dan PD masih lemah akibat asistensi, verifikasi dan sinkronisasi yang belum memadai.
- Kualitas dan transparansi atas proses pengadaan barang dan jasa serta keterbukaan informasi publik lainnya masih terbatas dan belum *massive*.



S.8

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- Belum seluruh Perangkat Daerah menerapkan SOP/SPM secara konsisten pada pelayanannya.
- Tidak tercukupinya kebutuhan sarana/ prasarana, fasilitas, alokasi pembiayaan dan SDM dalam penyelenggaraan SPM pelayanan dasar.
- Kualitas dan ketersediaan data kinerja SPM serta akuntabilitas kinerja pencapaian SPM pada perangkat daerah penyelenggara urusan masih lemah.



S.9

MENINGKATNYA PERLUASAN KESEMPATAN BERUSAHA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

- Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana perniagaan
- Rendahnya minat masyarakat untuk berusaha disektor swasta
- Belum semua koperasi aktif untuk menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat
- Lapangan kerja yang tersedia masih sangat terbatas dibandingkan jumlah angkatan kerja yang ada.
- Penyediaan Data dan Informasi bursa ketenagakerjaan masih sangat terbatas



S.10

MENINGKATNYA PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS

- Pertumbuhan perekonomian masih di dominasi pada sektor konsumsi.
- Belum bergerakinya sektor jasa



S.11

MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DALAM PEREKONOMIAN DAERAH

- Sangat minimnya promosi pariwisata yang dilaksanakan.
- Belum semua potensi dan produk ekonomi kreatif dapat di promosikan secara maksimal
- Potensi pariwisata belum di optimalkan pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kunjungan pariwisata.

1.6 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Sesuai perkembangan dan kondisi Kota Palopo sampai dengan Tahun 2017, beberapa isu strategis yang akan menjadi fokus penanganan Kota Palopo pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kualitas pelayanan dasar
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang sustainability dan penataan lingkungan yang memperhatikan aspek budaya
3. Pemenuhan kebutuhan dan pola konsumsi pangan berkualitas
4. Peningkatan nilai tambah, pengembangan sektor jasa, perdagangan dan industri rumah tangga
5. Ketertiban dan kenyamanan daerah serta partisipasi masyarakat dalam pemilu
6. Kinerja pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik berkualitas.

1.7 SISTEMATIKA PENYUSUNAN







BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program / kegiatan, didalam perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Kinerja Instansi Pemerintah, yang setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta menyediakan ukuran keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, rencana kinerja yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Kota Palopo telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 tahun (2018-2023). Rencana Kinerja Pemerintah Kota Palopo mencakup tujuan, sasaran, serta strategi untuk mencapai agenda dan sasaran.

RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1.1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Berdasarkan kondisi Kota Palopo saat ini, serta mencermati peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, maka Walikota dan Wakil Walikota merumuskan Visi Kota Palopo tahun 2018 – 2023 sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018 – 2023, sebagai berikut :

“Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023”

Pada visi tersebut terdapat 3 (tiga) kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Maju, Palopo yang maju bermakna bahwa Kota ini bergerak kearah yang lebih positif, ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap, lebih berkualitas, lebih berestetika dan bermanfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan warga.

Inovatif, Palopo yang inovatif bermakna bahwa kota ini selalu memberi solusi terhadap persoalan warga melalui pengelolaan pemerintahan dan layanan publik yang efisien, efektif dan berbasis riset, serta industri kreatif berkembang sebagai sektor utama penggerak ekonomi.

Berkelanjutan, Palopo yang berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan dilakukan secara harmoni sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inklusif secara sosial dan memperlihatkan kelestarian budaya lokal.

Palopo maju, inovatif dan berkelanjutan bermakna bahwa Kota Palopo memiliki visi dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memberi dampak positif dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pengembangan ekonomi kreatif dengan tetap memperhatikan keseimbangan harmonis antara lingkungan hidup dan kondisi budaya.



2.1.2. Misi

Sesuai dengan visi tersebut diatas dan sabagai upaya dalam mewujudkannya, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Palopo Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan;
2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan permukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau;
3. Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan;
4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis;
5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.

2.1.3. Tujuan ,Sasaran dan Indikator Kinerja

Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat priorotas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan, sasaran dan indikator pembangunan Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023		
Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja
1	2	3
Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat (T.1)	Indeks pembangunan manusia
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S.1)	Angka rata – rata lama sekolah
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.2)	Angka harapan hidup
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Persentase penduduk miskin

1	2	3	
Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan permukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau	Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas (T.2)	Indeks daya saing infrastruktur	
		Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Persentase areal kawasan kumuh
		Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategi daerah (S.5)	Indeks Layanan Jalan
		Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup (S.6)	Luas kawasan terdampak banjir Persentase luas ruang terbuka hijau
Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan	Terwujudnya birokrasi profesional komprehensif dan melayani (T.3)	Indeks reformasi birokrasi	
		Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan (S.7)	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Level SPIP daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik
Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis	Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	Pertumbuhan PDRB	
		Meningkatnya perluasan kesempatan berusaha dan produktivitas tenaga kerja (S.9)	Tingkat pengangguran terbuka
		Meningkatnya produksi dan produktivitas (S.10)	PDRB per kapita
Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu	Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing (T.5)	Kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDRB	
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kontribusi ekonomi kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dalam tahun 2019 Pemerintah Kota Palopo telah menetapkan 5 (lima) tujuan, 11 (sebelas) sasaran, dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang akan dicapai dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo.

Adapun perjanjian kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020
1		2	3	4
Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia dan kualitas hidup masyarakat (T.1)		Indeks Pembangunan Manusia	Point	77,98
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S.1)	Angka rata – rata lama sekolah	Tahun	10.39
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.2)	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,34
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Persentase penduduk miskin	Persen	7,64
Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas (T.2)		Indeks Daya Saing Infrastruktur	Angka	81
	Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	0
	Meningkatnya konektivitas dan Aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategi daerah (S.5)	Indeks Layanan Jalan	Persen	67,75
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Luas kawasan terdampak banjir	Ha	15
Persentase luas ruang terbuka hijau		Persen	76,93	

1		2	3	4
Terwujudnya birokrasi profesional komprehensif dan melayani (T.3)		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	66
	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan (S.7)	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Nilai	75
		Level SPIP daerah	Point	3
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Point	81,12
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)		Pertumbuhan PDRB	Persen	7,16
	Meningkatnya perluasan kesempatan berusaha dan produktivitas tenaga kerja (S.9)	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	9,51
	Meningkatnya produksi dan produktivitas (S.10)	PDRB per kapita	Juta/Thn	37,3
Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing (T.5)		Kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDRB	Persen	2,20
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	0,17
		Kontribusi ekonomi kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	2,82

2.3. PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tabel dibawah ini :

PENDAPATAN	969.489.736.506,27
PENDAPATAN ASLI DAERAH	221.552.741.601,65
Pendapatan Pajak Daerah	34.031.809.461,00
Hasil Retribusi Daerah	8.880.154.097,48
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.801.973.147,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	171.838.804.896,17
DANA PERIMBANGAN	665.583.965.763,00
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	18.379.394.493,00
Dana Alokasi Umum	497.008.966.000,00
Dana Alokasi Khusus	150.195.605.270,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	82.353.029.141,62
Pendapatan Hibah	21.165.966.380,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	46.443.640.112,62
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	6.983.797.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7.664.639.200,00
Pendapatan Lain-lain	94.986.449,00
BELANJA	943.913.098.116,19
BELANJA TIDAK LANGSUNG	416.771.223.157,44
Belanja Pegawai	396.956.702.677,00
Belanja Bunga	2.053.411.769,44
Belanja Hibah	5.592.900.000,00
Belanja Bantuan Sosial	2.469.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan partai politik	854.592.490,00
Belanja Tidak Terduga	8.844.116.221,00
BELANJA LANGSUNG	527.141.874.958,75
Belanja Pegawai	64.657.236.562,00
Belanja Barang dan Jasa	254.516.734.615,86
Belanja Modal	207.967.903.780,89

Sumber: BPKAD Kota Palopo Tahun 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Inti dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah pengukuran akuntabilitas kinerja yang dapat diukur dengan melakukan pengumpulan data kinerja yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pada akhir pelaksanaan rencana kerja tahunan dilakukan pengukuran terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang telah direncanakan pada awal tahun. Pengukuran tersebut

merupakan manifestasi simbolis dari komitmen akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas kinerja diukur dengan melakukan pengumpulan data kinerja yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Data kinerja dimaksud dilakukan verifikasi data internal guna menjaga keakuratan data. Kemudian capaian kerja diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja.

Adapun penanggungjawab data kinerja tiap – tiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	
Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat (T.1)	Indeks Pembangunan Manusia	
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S.1)	Angka rata – rata lama sekolah	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.2)	Angka harapan hidup	Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Persentase penduduk miskin	Dinas Sosial, Dinas Perkim, Dinas PP&KB, Dinas PPA, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, peternakan, perkebunan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, SatPolPP, Setda, Bappeda, BakesbangPol Linmas
Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan permukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau	Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas (T.2)	Indeks daya saing infrastruktur	
	Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Persentase areal kawasan kumuh	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas LH, Dinas Transmigrasi
	Meningkatnya konektivitas dan Aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategi daerah (S.5)	Indeks Layanan Jalan	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Luas kawasan terdampak banjir	Dinas PUPR, Dinas LH, Bappeda
		Persentase luas ruang terbuka hijau	Dinas PUPR, Dinas LH, Bappeda

1	2	3	
Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan	Terwujudnya birokrasi profesional komprehensif dan melayani (T.3)	Indeks reformasi birokrasi	
	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan (S.7)	Nilai akuntabilitas pemerintahan daerah	Bappeda, BPKAD, Inspektorat, BKPSDM, Dinas Persandian dan Statistik, Dinas Kearsipan, Bapenda, Sekretariat DPRD, Setda
		Level SPIP daerah	Bappeda, BPKAD, Inspektorat, BKPSDM, Dinas Persandian dan Statistik, Dinas Kearsipan, Bapenda, Sekretariat DPRD, Setda
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPBD, Damkar, Sat Pol PP, DPMPSTSP, Dinas LH, Dinas PP&KB, Dinas Kependudukan dan Capil, Dinas Pertanahan, Dinas Kearsipan, Setda, Balitbangda, Dinas Kominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, BakesbangPol, Kecamatan	
Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis	Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	Pertumbuhan PDRB	
	Meningkatnya perluasan kesempatan berusaha dan produktivitas tenaga kerja (S.9)	Tingkat pengangguran terbuka	Dinas Tenaga Kerja, Dinas PPPA, DPMPSTSP
	Meningkatnya produksi dan produktivitas (S.10)	PDRB per kapita	Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

1	2	3	
Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu	Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing (T.5)	Kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDRB	
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	Dinas Pariwisata dan Ekraf,Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga,Dinas Perdagangan,Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi, Dinas Perhubungan,Dinas PUPR
		Kontribusi ekonomi kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah	Dinas Pariwisata dan Ekraf,Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga,Dinas Perdagangan,Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi, Dinas Perhubungan,Dinas PUPR

3.1. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN 2020

Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Kota Palopo tahun 2020 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Palopo dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Palopo tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2018 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan

jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana pada Tabel 3.1.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 91%	Sangat Tinggi
2	76 % sd. 90 %	Tinggi
3	66 % sd. 75 %	Sedang
4	51 % sd. 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Indikator Kinerja Utama atau IKU Pemerintah Kota Palopo merupakan indikator kinerja yang menjadi *inti (core)* atas keberhasilan pembangunan di Kota Palopo. Indikator ini dipilih sebagai ukuran keberhasilan atas penanganan permasalahan pembangunan oleh Pemerintah Kota Palopo selama lima tahun ke depan sampai dengan 2023.

Sesuai RPJMD periode 2018-2023, IKU Kota Palopo sebanyak 19 Indikator, yang merupakan ukuran keberhasilan atas 5 Tujuan dan 11 sasaran pembangunan daerah. IKU Kota Palopo 2018-2023 ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palopo Nomor **398/IX/Tahun 2019**.

Berikut adalah tabel capaian kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019, sesuai sasaran, indikator sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja :

Tabel 3.1.2
Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Palopo
Tahun 2019

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Kinerja	Kategori Predikat Kinerja
1	2	3	4		
Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia dan kualitas hidup masyarakat (T.1)	Indeks pembangunan manusia	77,98	78,06	100,10%	SANGAT TINGGI

1	2	3	4		
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S.1)	Angka rata – rata lama sekolah	10,39	10,76	103,56%	SANGAT TINGGI
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.2)	Angka harapan Hidup	70,34	70,88	100,8%	SANGAT TINGGI
Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Persentase penduduk miskin	7,64	7,85	97,32%	SANGAT TINGGI
Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas (T.2)	Indeks daya saing infrastruktur	81	85,88	106,02%	SANGAT TINGGI
Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Persentase areal kawasan kumuh	0	0,02	100%	SANGAT TINGGI
Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategi daerah (S.5)	Indeks Layanan Jalan	67,75	73,00	107,75%	SANGAT TINGGI
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup (S.6)	Luas kawasan terdampak banjir	15	54,95	22,53%	SANGAT RENDAH
	Persentase luas ruang terbuka hijau	76,93	76,95	100,16%	SANGAT TINGGI
Terwujudnya birokrasi profesional komprehensif dan melayani (T.3)	Indeks reformasi birokrasi	66	52,70	79,85%	TINGGI
Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan (S.7)	Nilai akuntabilitas pemerintahan daerah	75	52,43	69,90%	SEDANG
	Level SPIP daerah	3	3	100%	SANGAT TINGGI
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	81,12	83,06	102,39%	SANGAT TINGGI
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	Pertumbuhan PDRB	7,16	0,45	6,28%	SANGAT RENDAH

1	2	3	4		
Meningkatnya perluasan kesempatan berusaha dan produktivitas tenaga kerja (S.9)	Tingkat pengangguran terbuka	9,51	10,37	91,70%	SANGAT TINGGI
Meningkatnya produksi dan produktivitas (S.10)	PDRB per kapita	37,3	42,61	114,24%	SANGAT TINGGI
Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing (T.5)	Kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDRB	2,2	0,14	6,36%	SANGAT RENDAH
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	0,17	0,02	11,76%	SANGAT RENDAH
	Kontribusi ekonomi kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah	2,82	2,26	80,14%	TINGGI
RATA RATA KINERJA CAPAIAN IKU				78,93%	TINGGI

Hasil analisis pencapaian indikator kinerja terhadap 11 (sebelas) sasaran yang mencakup 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama, diketahui bahwa :

- ❖ 12 indikator kinerja utama atau 63% Pencapaian Kinerjanya Sangat Tinggi,
- ❖ 2 indikator kinerja utama atau 10,4% Pencapaian Kinerjanya Tinggi,
- ❖ 1 indikator kinerja utama atau 5,2% Pencapaian Kinerjanya Sedang,
- ❖ 0 indikator kinerja utama atau 0% Pencapaian Kinerjanya Rendah.
- ❖ 4 indikator kinerja utama atau 21% pencapaiannya Sangat rendah

Sesuai hasil pengukuran indicator kinerja utama Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020, kinerja Pemerintah Kota Palopo berada pada angka 78,93% atau Tinggi. Kinerja tahun 2020 tersebut, menurun dibandingkan tahun 2019 yang berada pada posisi 99,01% atau SangatTinggi. Penurunan capaian kinerja pada tahun 2020 pada umumnya disebabkan oleh kondisi nasional Pandemi Covid-19.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang posisi pencapaian kinerja tahun 2020 Pemerintah Kota Palopo, apakah lebih baik ataukah belum lebih baik, berikut adalah tabel perkembangan sekaligus perbandingan capaian kinerja tahun 2020, terhadap capaian tahun sebelumnya dan posisinya terhadap target pada masa akhir kinerja RPJMD yakni tahun 2023.

Tabel 3.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja IKU Tahun 2019 Terhadap Capaian Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD (2023) Pemerintah Kota Palopo

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019	REALISASI 2020	TARGET AKHIR RPJMD 2023	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA S.D 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD 2023
1	2	3	4	5
Indeks pembangunan manusia	77,98	78,06	79,25	98,40
Angka rata – rata lama sekolah	10,75	10,76	10,56	101,89
Angka Harapan Hidup	70,79	70,88	70,4	100,68
Persentase penduduk miskin	7,82	7,85	6,08	77,45
Indeks daya saing infrastruktur	85,77	85,88	84	102,11
Persentase areal kawasan kumuh	0,15	0,02	0	100
Indeks Layanan Jalan	67,51	73,00	68,75	106,18
Luas kawasan terdampak banjir	12,38	54,95	2	3,64
Persentase luas ruang terbuka hijau	76,95	76,95	77,20	99,68
Indeks Reformasi Birokrasi	52,70	52,70	72	73,19
Nilai akuntabilitas pemerintahan daerah	52,43	52,43	85	61,7
Level SPIP daerah	3	3	3	100
Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	83,40	83,06	82,03	101,25
Pertumbuhan PDRB	6,75	0,45	7,22	6,2
Tingkat pengangguran terbuka	10,32	10,37	8,07	80,71
PDRB per kapita	43,02	42,61	37,8	112,72
Kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDRB	1,51	0,14	2,60	5,38
Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah	0,05	0,02	0,24	8,3
Kontribusi ekonomi kreatif terhadap pendapatan asli daerah	3,76	2,26	2,88	78,47

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 yang capaian kinerjanya “Lebih Baik” dari capaian Tahun 2020 sebanyak 7 (tujuh) indikator. Jumlah indikator kinerja utama tahun 2020 yang capaian kinerjanya “Belum lebih baik dari capaian tahun 2019 sebanyak 12 (Dua Belas) indikator. Dan jumlah indikator kinerja utama tahun 2019 yang capaian kinerjanya “Melebihi” target akhir RPJM Tahun 2023 sebanyak 6 (Enam) Indikator.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN 2019

Tujuan pembangunan Kota Palopo sebanyak 5 (lima) tujuan dengan 5 (lima) indikator tujuan. Hasil pengukuran capaian tujuan Pemerintah Kota Palopo 2019, hasilnya sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2020

No	Tujuan ke	Nilai Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)	100.10	Sangat Tinggi
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)	106.02	Sangat Tinggi
3	Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani (T.3)	79,85	Tinggi
4	Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	6,28	Sangat Tidak Berhasil
5	Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T.5)	6,36	Sangat Tidak Berhasil
TOTAL NILAI RATA-RATA TUJUAN DAN PREDIKAT KINERJA		59,72	Rendah

Tujuan I : Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat(T.1)

Berdasarkan tabel 3.2.1 diatas diketahui bahwa capaian kinerja tujuan pembangunan daerah untuk tujuan 1(satu) sebesar **100,2** atau memiliki predikat **Sangat Tinggi**.

Indeks Pembangunan Manusia

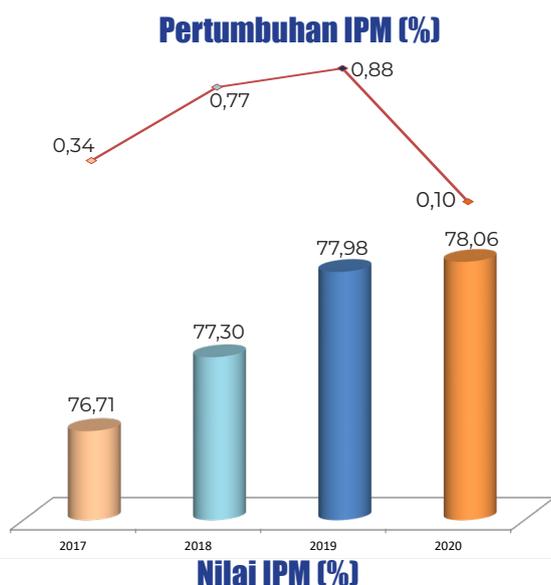
Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator tujuan pembangunan yang pertama di Kota Palopo, sekaligus menjadi IKU pertama Kota Palopo. Berikut adalah capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo tahun 2020 :

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Tujuan I

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET 2019	REALISASI 2019		
Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	77.98	78.08	100.10	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				100.10	Sangat Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT TUJUAN I				100.10	Sangat Tinggi

Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo Tahun 2020 berada pada angka 78.06 Poin, melampaui target IPM daerah 2020 yang berada pada angka 77.98 Poin. Ini bermakna bahwa capaian kinerjanya pada tahun 2020 berkategori sangat tinggi, dengan persentase realisasi kinerja 100.10%. Dibandingkan capaian tahun sebelumnya (2019), IPM Kota Palopo 2020 juga lebih baik, tumbuh 0.08 Poin, dimana tahun 2019, IPM Kota Palopo berada pada angka 77.98 Poin. Sepanjang rentan waktu 2015-2020, IPM Kota Palopo terus meningkat, dari 76.27 (2015), 76.45 (2016), 76.71 (2017), 77.30 (2018) dan 77.98 (2019).

Capaian IPM Kota Palopo 2020 ini juga melampaui rata-rata IPM Sulsel 2020 (71.93 Poin), berada diatas IPM Kota Pare-Pare 2020 (77.86 Poin) dan menempati peringkat ke dua IPM dari 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, dibawah Kota Makassar yang pada tahun 2020 berada pada angka 82.25 Poin. Dibandingkan empat kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan Kota Palopo, IPM Kota Palopo 2020 adalah yang tertinggi, melampaui IPM Kabupaten Luwu (70.51), Kabupaten Luwu Utara (69.57), Kabupaten Luwu Timur (73.22), dan Kabupaten Toraja Utara yang IPM nya berada pada angka 69.33 Poin. Kemudian bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Palopo periode 2018-2023 yang menargetkan IPM berada pada angka 79.25 poin, pencapaian IPM sampai dengan tahun 2020 Kota Palopo, telah terealisasi sebesar 98.40%.



*sumber : BPS Kota Palopo

Dimensi	Indikator	2018	2019	2020
Kesehatan	Angka Harapan Hidup	70,49	70,79	70,88
	Indeks Kesehatan	77,44	78,14	78,28
Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	15,06	15,07	15,08
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,51	10,75	10,76
	Indeks Pendidikan	76,81	77,69	77,76
Standar Hidup Layak	Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu rupiah)	12662	12986	12995
	Indeks Pengeluaran	76,88	78,12	78,14

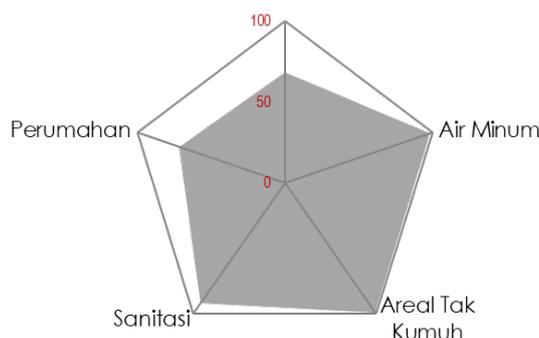
Tabel 3.2.3

Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020	TARGET AKHIR RPJMD 2023	CAPAIAN KINERJA S.D 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD 2023 (%)
Indeks Pembangunan Manusia (Point)	77.98	78.06	79.25	98.40

Tujuan II : Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)

Indeks daya saing infrastruktur adalah indikator yang memperlihatkan kemantapan infrastruktur dasar yang terdiri atas kualitas jalan, akses air minum, penyehatan lingkungan permukiman dan pemilikan rumah. Tiap indikator memiliki bobot yang sama dan indeks didapatkan melalui rerata dari nilai setiap indikator tersebut. **Semakin penuh spiderweb** yang dibentuk (gambar di bawah), maka semakin berdaya saing infrastruktur suatu wilayah pada aspek yang diukur.



Berdasarkan analisis, didapatkan indeks 85,88. Nilai ini lebih tinggi 4,88 poin dibanding target 2020. Sementara itu, jika dikomparasi dengan target akhir RPJMD Kota Palopo, maka capaian ini telah melampaui dari target 84 poin. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat capaian terhadap RKPD 2020 adalah 106,02%, sedangkan terhadap RPJMD 2023 adalah 102,11%. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur dasar di Kota Palopo semakin baik dan semakin berdaya saing.

Tabel 3.2.4
Capaian Kinerja Tujuan II

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET 2020	REALISASI 2020		
Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)	Indeks Daya Saing Infrastruktur	81	85,88	106,02	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				106,02	Sangat Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT TUJUAN II				106,02	Sangat Tinggi

Indeks Daya Saing Infrastruktur Kota Palopo 2020 yaitu 85,88, capaian ini jauh melampaui target tahun 2020 yaitu 81 bahkan capaian ini telah melampaui target akhir RPJMD yaitu sebesar 84.

Tabel 3.2.5
Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan II

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020	TARGET AKHIR RPJMD 2023	CAPAIAN KINERJA S.D 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD 2023 (%)
Daya Saing Infrastruktur	85,77	85,88	84	102,11

Tujuan III : Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani (T.3)

Berdasarkan tabel 3.2.1 diatas diketahui bahwa capaian kinerja tujuan pembangunan daerah untuk tujuan 3 (tiga) sebesar **79,85** atau memiliki predikat **Tinggi**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan rata-rata kelompok, pada tujuan ketiga nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian tujuan, sebab tujuan ketiga hanya memiliki 1(satu) IKU.

Tabel 3.2.6
Capaian Kinerja Tujuan III

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET 2020	REALISASI 2020		
Terwujudnya Birokrasi Profesional kompetitif dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	66	52,70	79,85	Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				79,85	Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT TUJUAN I				79,85	Tinggi

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Palopo tahun 2020 sampai saat laporan ini disusun, belum dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, sehingga untuk kebutuhan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih menggunakan indeks reformasi birokrasi tahun 2019, yaitu sebesar 52,70 atau kategori CC. Capaian ini belum memenuhi target tahun 2020 yaitu 66 dan masih di bawah target akhir RPJMD yaitu 72. Sehingga capaian kinerja indikator terhadap target akhir RPJMD adalah 73,19%.

Tabel 3.2.7
Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan III

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020	TARGET AKHIR RPJMD 2023	CAPAIAN KINERJA S.D 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD 2023 (%)
Indeks Reformasi Birokrasi	52,70	52,70	72	73,19%

Tujuan IV : Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)

Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Kota Palopo adalah indikator tujuan pembangunan keempat pembangunan Kota Palopo periode 2018-2023. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan PDRB Kota Palopo hanya berada pada angka 0.45% (BPS Kota Palopo Tahun 2021). Kondisi ini belum mencapai target pemerintah tahun 2020, yang berada pada angka 7.16% pada RKPD Pokok Tahun 2020. Bahkan juga tidak memenuhi angka target perubahan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2020, yang menempatkan angka 4.16% sebagai target laju pertumbuhan PDRB. Angka pertumbuhan LPE 2020, juga tertinggal jauh dengan LPE 2019 yang berada pada angka 6.75%.

Sehingga realisasi kinerja indikator tujuan pembangunan keempat ini pada tahun 2020, hanya pada angka 6.28%. Kinerja ini juga tertinggal jauh dengan kinerja tahun 2019, yang berada pada posisi 94.54% dari target yang ditetapkan 2019. Berikut adalah capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo tahun 2020.

Tabel 3.2.8
Capaian Kinerja Tujuan IV

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET 2020	REALISASI 2020		
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	Pertumbuhan PDRB (%)	7,16	0,45	6,28	Sangat Rendah
RATA-RATA CAPAIAN IKU				6,28	Sangat Rendah
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT TUJUAN IV				6,28	Sangat Rendah

Bila dibandingkan periode sebelumnya, laju pertumbuhan PDRB Kota Palopo tahun 2020 ini, sangat jauh berada dibawah angka laju pertumbuhan PDRB Kota Palopo tahun sebelumnya yang berada pada angka 6-7% setiap tahunnya. Bahkan LPE 2020, menjad laju pertumbuhan PDRB Kota Palopo yang paling terendah sepanjang berdirinya Kota Palopo. Hal ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Berikut adalah kondisi laju pertumbuhan PDRB Kota Palopo rentan waktu 2015-2020 :

No	INDIKATOR	Laju Pertumbuhan PDRB Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan PDRB (%/Tahun)	6,45	6,98	7,19	7,52	6,75	0,45

Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan wilayah lain, angka LPE 2020 Kota Palopo masih lebih baik dari angka LPE Kota Makassar yang berada pada angka minus yakni (-1.27%), Kota Pare-Pare, minus (-0.08%) dan rata-rata angka LPE Sulawesi Selatan minus (-0.70%) bahkan LPE Nasional minus (-0.21%). LPE Kota Palopo masih tumbuh positif, sementara daerah lain, melambat dan berada pada angka negative dibandingkan setahun 2019. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, meskipun nilai produksi barang dan jasa menurun dibandingkan 2019, tahun 2020 di Kota Palopo, masih terjadi peningkatan nilai produksi barang dan jasa sebesar 0.45%, kondisi tersebut tidak mampu dilakukan daerah lain sehingga angka LPEnya berada pada posisi negatif.

Tentu ini menjadi catatan tersendiri bagi Kota Palopo, tetap mampu menghasilkan nilai produksi barang dan jasa walaupun jauh dibawah nilai produksi barang dan jasa tahun 2019, disaat daerah atau wilayah lain, tidak mampu merealisasikannya. Berikut adalah perbandingan angka laju LPE beberapa wilayah di Sulsel Tahun 2020 :

Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2020 (%)
Kota Palopo	0,45
Kota Makassar	-1,27
Kota Pare Pare	-0,08
Sulawesi Selatan	-0,70
Nasional	-2,1

Berikut adalah perkembangan nilai PDRB Kota Palopo tahun 2018-2020 :

Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo Tahun 2017- 2019

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar Rp)	Pertumbuhan (%)
2018	5.102,99	7,52
2019	5.447,36	6,75
2020	5,472,08	0.45

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2020

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2019-2020, masih terdapat peningkatan nilai nilai produksi barang dan jasa di Kota Palopo senilai 24.72 (Milliar) dengan persentase peningkatan njlai PDRB sebesar 0.45% daritahun 2019.

Perkembangan Capaian Nilai

PDRB Kota Palopo (ADHB & ADHK)

Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2018-2020

No	Bidang / Urusan	PDRB ADHB Tahun			PDRB ADHK Tahun		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.232,24	1,301.47	1,352.04	830,61	871,74	884.51
2	Pertambangan & Penggalian	12,16	12.39	12.55	6,71	6,82	6.76
3	Industri Pengolahan	197,01	216.26	205.18	129,18	139,20	130.85

No	Bidang / Urusan	PDRB ADHB Tahun			PDRB ADHK Tahun		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,81	6.05	6.18	5,67	5,89	6.1
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12,50	13.55	13.61	14,75	15,42	15.42
6	Konstruksi	1.194,98	1,330.13	1,325.43	734,33	779,14	774.84
7	Perdagangan Besar&Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.723,39	1,938.86	1,963.95	1.291,73	1.421,61	1,426.60
8	Transportasi dan Pergudangan	432,45	475.89	409.35	286,15	312,34	268.07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85,98	93.72	87.5	59,80	64,55	60.02
10	Informasi dan Komunikasi	301,91	335.27	374.82	303,02	335,22	376.6
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	566,53	579.66	593.39	383,21	382,09	391.48
12	Real Estat	358,34	384.06	403.01	233,02	246,38	258.25
13	Jasa Perusahaan	6,72	7.52	7.46	4,61	5,07	4.97
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	580,05	616.97	624.2	368,09	380,14	377.91
15	Jasa Pendidikan	309,44	342.26	349.4	247,46	262,10	265.76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	171,40	184.63	193.41	137,06	145,79	150.56
17	Jasa Lainnya	94,22	103.82	103.81	67,61	73,88	73.37
	PDRB ADHB	7.285,14	7,942.48	8,025.29	5.102,99	5.447,36	5,472.08

Tabel diatas menunjukkan bahwa, beberapa lapangan usaha yang tetap mampu meningkatkan nilai produksi barang dan jasanya sepanjang tahun 2020 adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan lapangan usaha informasi dan komunikasi. Namun lapangan usaha seperti transportasi dan pergudangan, industri pengolahan, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah tiga lapangan usaha yang nilai produksi barang dan jasanya, berkurang sepanjang 2019-2020.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan laju pertumbuhan ekonomi Kota Palopo adalah sebagai berikut :

1. Posisi sebagai zona merah dan zona orange, penyebaran pandemic covid 19 di Kota

Palopo tahun 2020 menyebabkan banyak aktifitas berusaha dan kegiatan produktif masyarakat terhambat.

2. Sebagian besar belanja infrastruktur daerah di Kota Palopo ditunda, dan sejumlah komitmen investasi sector swasta di Kota Palopo mengalami reschedule, jumlah UMKM yang terdampak akibat pembatasan social dan jam operasional usaha sebanyak 6.265 unit usaha, jumlah total tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan pada angka 2086 orang. Jumlah hotel yang sempat ditutup sebanyak 5 buah, tingkat hunian (okupansi) turun sampai pada angka 5%, dan sekitar 70% karyawan hotel dirumahkan.
3. Pandemi menekan aktifitas berusaha masyarakat akibat adanya pembatasan social, dan himbauan menjaga jarak fisik dan social (physical / social distance). Pembatasan-pembatasan tersebut berpengaruh terhadap pola produksi, distribusi bahkan sampai tingkat konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dan beberapa sector yang paling terdampak adalah perdagangan, jasa perhotelan, makanan akomodasi dan kuliner.
4. Sejumlah lapangan usaha produktif di Kota Palopo seperti Lapangan Usaha Kuliner, Makanan Minuman dan Restoran, cukup banyak yang tutup akibat pembatasan social berskala besar yang dilakukan Pemerintah untuk merespon penyebaran virus covid 19.

Upaya Pemulihan Dampak Covid 19 di Kota Palopo Tahun 202

1. Memantapkan Layanan Sistem Kesehatan Daerah

Penekanannya pada aspek :

- Mengoptimalisasi Upaya untuk menghentikan dan menangani Penyebaran Covid 19
- Memantapkan Pelaksanaan serta Edukasi Masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Mulai dari Individu, Keluarga dan Lingkungan.
- Memastikan bahwa protocol kesehatan tetap dijalankan dan terus dioptimalisasi pada area layanan public, sekolah/civitas akademik, dan lembaga pemerintah dan dunia usahalainnya.
- Memantapkan Pelaksanaan Pencegahan Dini Penyakit Menular
- Memantapkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Kesehatan Terutama yang Terkait dengan Pandemi Covid 19
- Memantapkan Cakupan Layanan Iuran Kepesertaan BPJS Daerah
- Mengoptimalisasi peran dan sinergi penanganan dengan Kelurahan Tanggung Bencana

2. Pemantapan Pelaksanaan Social Safety Net (Jaringan Pengamanan Sosial)

Penekanan pada aspek:

- Mengoptimisasi dan Menjaga Efektifitas serta Sinergi Cakupan Layanan Program Program Jaring Pengaman Sosial ke Masyarakat baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, provinsi maupun pemangku kepentingan lainnya.
- Memastikan bahwa bantuan social yang bersumber dari APBD daerah dilaksanakan tepat sasaran dan mempertimbangkan Basis Data Terpadu, atas bantuan social yang dilaksanakan Perangkat Daerah ke Masyarakat
- Memastikan bahwa harga pangan dan ketersediaannya relative mampu diakses dan dijangkau masyarakat melalui optiamlisasi pengelolaan empat rumah pangan yang ada di Kota Palopo.
- Memastikan barang bersubsidi tetap tersedia dengan harga sesuai HET Pemerintah.

3. **Pemantapan Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah**

Penekanannya pada aspek :

- Memfasilitasi reschedule komitmen investasi dari sejumlah investor yang tertunda akibat pandemi covid 19
- Menjaga dan mengoptimisasi produksi dan produktifitas daerah, dan menjaga ketahanan pangan daerah
- Mengoptimisasi bantuan-bantuan usaha kepada kelompok usaha masyarakat
- Memastikan dan memulihkan kembali bahwa seluruh aktifitas lapangan usaha kembali berjalan, sesuai scenario *new normal* dengan protocol kesehatan
- Memperluas cakupan pelatihan tenaga kerja berbasis life skill dan fasilitasi akses pada lapangan berusaha
- Memastikan proyek proyek infrastruktur padat karya mengkomodirtenagakerja local masyarakat.
- Memastikan infrastruktur yang menunjang perekonomian mampu diakses dan dimanfaatkan masyarakat secara optimal
- Memastikan pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dijalankan perangkat daerah secara integrative dan bersinergi
- Mengoptimalkan peran dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengakselerasi ekonomi masyarakat dan ekonomi daerah

4. **Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Pandemi Tahun 2020**

Kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kota Palopo sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Palopo merefocusing APBD 2020 yakni 10.9 Milyar untuk Penanganan Kesehatan, 5,3 Milyar untuk penanganan dampak ekonomi, 1.6 Milyar untuk jarring Pengaman Sosial yang masih sebagai Belanja Tidak Terduga

2. Pembiayaan sector kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang terdampak pandemic covid 19 jadi prioritas ;
3. Menetapkan peraturan walikota, untuk menangani penyebaran dan pengendalian Covid-19;
4. Belanja daerah, juga diarahkan untuk mengatasi Covid-19, dan melakukan upaya penghematan, dengan melakukan rasionalisasi anggaran program dan kegiatan perangkat daerah,
5. Untuk menjaga perekonomian daerah, Pemerintah Kota Palopo akan mengupayakan percepatan belanja dan kebijakan mendorong pada tkarya, untuk kegiatan produktif yang menyerap tenaga kerja.
6. Memastikan penyaluran dana program program perlindungan social masyarakat oleh pemeirntah pusat, dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Palopo dalam Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi Covid 19 :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
Penanaman Modal			
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	DPMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
Perdagangan			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Dinas Perdagangan
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dinas Perdagangan
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinas Perdagangan
Perindustrian			
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/ Kota	Dinas Perindustrian
Koperasi			
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinas Koperasi & UMKM
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi & UMKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi & UMKM

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
Pertanian			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penuhupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan
Perikanan			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dinas Perikanan
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan
		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
		Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
Pariwisata			
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Disparekraf
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Disparekraf
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik dalam dan Luar Negeri	Disparekraf
Pekerjaan Umum			

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Pembangunan Jalan	Dinas PU PR
		Pemeliharaan Berkala Jalan	
		Pembangunan Jembatan	
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	
Ketahanan Pangan			
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kerawanan Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan V : Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T.5)

Berdasarkan tabel 3.2.1 diatas diketahui bahwa capaian kinerja tujuan pembangunan daerah untuk tujuan 5 (lima) sebesar **6,36** atau memiliki predikat **Sangat Rendah**. Nilai ini merupakan perbandingan antara besarnya Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap peningkatan PDRB Kota Palopo. Lapangan usaha yang berkontribusi terhadap pencapaian target PAD sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah objek wisata itu sendiri, lapangan usaha penyediaan akomodasi, makan minum dan jasa lainnya. Nilai PDRB Kota Palopo Tahun 2020 pada angka Rp. Rp. 8.025.290.000.000,- sementara jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp. 11.388.087.169,- atau berkontribusi sebesar 0,14%. Ini berarti masih dibawah target 2020 yang berada pada angka 2,20%. Sehingga realisasi kinerja tujuan dari indicator tujuan ke lima hanya sebesar 6,36% dari target yang ditetapkan. Hal ini banyak disebabkan karena kondisi global pandemi Covid-19 yang juga terjadi di Kota Palopo.

Sesuai metode pengukuran berdasarkan rata-rata kelompok, pada tujuan kelima nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian tujuan, sebab tujuan kelima hanya memiliki 1 IKU.

Tabel 3.2.9
Capaian Kinerja Tujuan V

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET	REALISASI		
Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing	Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB	2,2	0,14	6,36	Sangat Rendah
RATA-RATA CAPAIAN IKU				6,36	Sangat Rendah
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT TUJUAN V				6,36	Sangat Rendah

Kontribusi pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Kota Palopotahun 2020 sebesar 0,14% yang berarti sebesar 5,38 % dari target akhir RPJMD Kota Palopo Tahun 2023 seperti yang di gambarkan pada tabel 3.2.10.

Tabel 3.2.10
Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan V

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020	TARGET AKHIR RPJMD 2023	% CAPAIAN KINERJA S.D 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD 2023 (%)
1 Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB	1,51%	0,14%	2,60%	5,38

3 . 3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota PalopoTahun 2020

Sasaran pembangunan Kota Palopo sebanyak 11(sebelas) sasaran dengan 14 (empat belas) indicator sasaran. Hasil pengukuran capaian sasaran pembangunan Pemerintah Kota Palopo 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah
Kota Palopo Tahun 2020

No	Sasaran ke	Nilai Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S.1)	103.56	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.2)	100.8	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	97.32	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	100	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategi daerah (S.5)	107,75	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup (S.6)	61,34	Rendah
7	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan (S.7)	84,95	Tinggi
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	102,39	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya perluasan kesempatan berusaha dan produktivitas tenaga kerja (S.9)	91,70	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya produksi dan produktivitas (S.10)	114.24	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	45,95	Sangat Rendah
TOTAL NILAI RATA-RATA SASARAN DAN PREDIKAT KINERJA		91,86	Sangat Tinggi

Sasaran I : Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran satu sebesar **103,56** atau memiliki predikat **Sangat Tinggi/Sangat Berhasil**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan rata-rata kelompok, pada sasaran pertama nilai capaian indikator samadengan nilai capaian sasaran, sebab sasaran pertama hanya memiliki 1 indikator kinerja

Tabel 3.3.2
Capaian Kinerja Indikator Sasaran I

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET	REALISASI		
Meningkatnya-Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	10.39	10.76	103.56	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				103.56	Sangat Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN I				103.56	Sangat Tinggi

Sesuai RPJMD Kota Palopo 2018-2023, Indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan derajat pendidikan masyarakat adalah Angka Rata-Rata Lama Sekolah yang diharapkan terus meningkat dari tahun ketahun.

Dan sesuai hasil evaluasi capaian kinerja sasaran pertama yang memiliki hanya 1 (satu) Indikator Kinerja, angka atau nilai rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 103.56. Sesuai skala ordinal yang ada, predikat kinerjanya adalah **SANGAT BERHASIL**. Berikut adalah hasil pengukuran kinerja indicator sasaran pembangunan daerah pertama Kota Palopo.

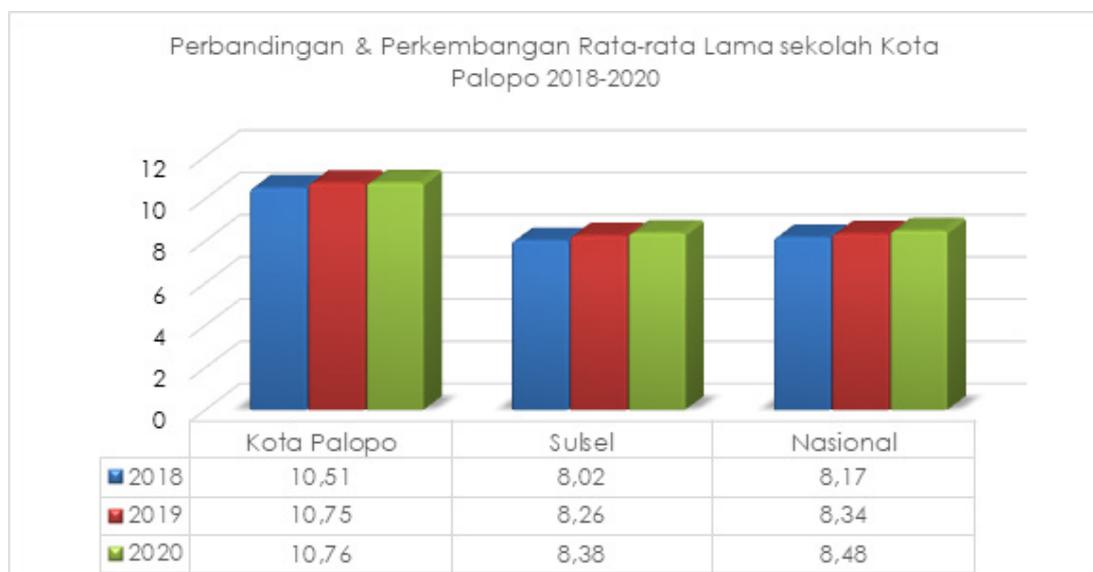
Tabel 3.3.3
Pengukuran Kinerja Sasaran I

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2019	Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja 2020 (%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target	Realisasi			
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat(S.1)	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	10.75	10.39	10.76	103.56	10.56	101.89

Capaian rata-rata lama sekolah 2020 ini juga telah melampaui target capaian akhir RPJMD 2023 yang berada pada angka 10.56 Tahun. Olehnya dalam perubahan RPJMD 2018-2023 nantinya target angka rata-rata lama sekolah ini akan ditingkatkan untuk memacu kinerja indicator ini.

Posisi angka rata-rata lama sekolah kota palopo 2020 ini juga melampaui atau berada di atas rata-rata lama sekolah sulsel 2020 yakni 8.38 Tahun, lebih baik dari Kota Pare-Pare (10.45 Tahun), Luwu (8.24 Tahun), Luwu Utara (7.79 Tahun), Luwu Timur (8.80 Tahun), namun masih berada di bawah Kota Makassar (11.21 Tahun).

Berikut adalah grafik perkembangan dan perbandingan rata-rata lama sekolah Kota Palopo 2018-2020 :



Selain indikator rata-rata lama sekolah, meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kota Palopo juga di indikasikan dari beberapa indicator lain misalnya meningkatnya harapan lama sekolah yang pada tahun 2020 berada pada angka 15.08 tahun, yang pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing berada pada angka 15.07 tahun dan 15.06 tahun. Harapan lama sekolah Kota Palopo tahun 2020, juga lebih baik dari harapan lama sekolah Sulse 2020 (13.45 Thn), Kota Pare-Pare (14.50 Tahun), dan sedikit dibawah harapan lama sekolah Kota Makassar (15.57 Tahun).

Demikian pula dengan indeks pendidikan Kota Palopo 2020 (77.76) yang lebih baik dari tahun 2019 (77.69) dan 2018 (76.87). Indeks pendidikan Kota Palopo 2020 ini juga melampaui Indeks Pendidikan Sulse (65.29), Kota Pare-Pare (75.11) namun masih tertinggal dibandingkan Kota Makassar (80.62)

Peningkatan derajat pendidikan masyarakat Kota Palopo juga ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi dalam bidang pendidikan. Berikut adalah perkembangan angka partisipasi pendidikan di Kota Palopo tahun 2018-2023 :

Tabel
Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan
Kota Palopo 2018-2023

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun		
		2018	2019	2020
1	Angka melek huruf (%)	97.71	98.4	98.16
2	Angka Partisipasi Kasar			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	112.89	105.99	104.62
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	84.17	86.02	87.87
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	110.31	110.74	107.53
3	Angka Partisipasi Murni			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99.78	99.44	99.01
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	78.39	78.11	78.33
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	67.99	67.4	67.62
5	Angka partisipasi sekolah (%)			
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (Per 1000)	997.8	997	995.3
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (Per 1000)	100	991.7	986.9
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C (Per 1000)	847.5	844.3	843.1

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palopo untuk memastikan bahwa sasaran pertama ini bisa dicapai adalah :

- a. Memastikan tidak ada peserta didik pendidikan dasar yang putus sekolah karena persoalan keterbatasan biaya melalui pelaksanaan program pendidikan gratis.
- b. Menyediakan seragam dan peralatan sekolah secaracuma-cuma (gratis) bagi seluruh peserta didik, yang baru tamat dan akan melanjutkan ketingkat pendidikan berikutnya, dan masih menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palopo.
- c. Memastikan bahwa semua sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Palopo, mengelola dana BOS Pendidikannya secara baik dan benar, sehingga mampu meringankan beban biaya atas pendidikan yang dirasakan masyarakat.
- d. Memastikan bahwa upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan, baik pada tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), SD dan SMP dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dengan system kolaborasi. Misalnya mengembangkan saranajalan (oleh Dinas PU) dan meningkatkan kelancaran/keterseediaan transportasi angkutan umum/public (oleh Dishub) yang lebih optimal dari dan menuju lokasi sarana pendidikan.

Tabel 3.3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dan Kinerja Keuangan

Tahun	Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)	Anggaran
2020	103.56	98.67%	35,979,030,828
2019	103.76	98.06%	46,490,466,560
Efisiensi Belanja Pada Sasaran Pertama			10,511,435,732

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2020 mengalokasikan belanjasebesar Rp. 36,463,345,823 yang dikelola oleh dua perangkat daerah yakni Dinas Pendidikan dan dinas Perpustakaan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 35,979,030,828 atau 98.67%. Artinya realisasi kinerja yang bias dicapai Pemerintah Kota Palopo masih lebih besar, daripada realisasi keuangan. Sebab kinerja sasaran pertama berada pada angka 103.56% sementara realisasi keuangan hanya pada angka 98,67%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Palopo telah mampu melaksanakan efisiensi sumberdaya keuangan dalam pencapaian sasaran pembangunan pertama.

Kemudian bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 lalu, dimana Pemerintah Kota Palopo merealisasikan anggaran sebesar Rp. 46,490,466,560 dan menghasilkan kinerja sasaran pada angka 103.76. Ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam efisiensi belanja yang lebih terus membaik, sebab dengan realisasi pendanaan yang lebih kecil dibandingkan tahun 2019, tetapi kinerja yang dihasilkan hanya berbeda sedikit.

Berikut adalah program dan realiasi keuangan pada sasaran pembangunan pertama tahun 2020 :

Tabel 3.3.5
Program dan Realisasi Keuangan Sasaran 1

Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan	138,595,000	138,595,000	100.00
Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan	22,719,662,573	22,389,072,243	98.54

Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi
Program Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan	146,634,000	100,726,716	68.69
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dinas Pendidikan	116,882,600	116,870,600	99.99
Program Pelaksanaan Pendidikan Gratis	Dinas Pendidikan	4,398,712,900	4,377,863,400	99.53
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	57,024,500	56,014,000	98.23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	8,796,001,750	8,710,056,369	99.02
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	89,832,500	89,832,500	100
Kinerja Anggaran		36,463,345,823	35,979,030,828	98.67%

Sasaran II : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)

Rata-rata capaian indicator kinerja utama pada sasaran kedua sebesar **100.8%** dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar **100.8%** atau memiliki predikat **Sangat Tinggi/Sangat Berhasil**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasaran kedua nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian sasaran, sebab sasaran kedua hanya memiliki 1 IKU.

Tabel 3.3.6
Capaian Kinerja Indikator Sasaran II

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET	REALISASI		
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Angka Harapan Hidup (Thn)	70.34	70.88	100.8%	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				100.8	Sangat Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN II				100.8	Sangat Tinggi

Sesuai RPJMD Kota Palopo 2018-2023, Indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat adalah Angka harapan Hidup yang diharapkan terus meningkat dari tahun ketahun. Indikator ini menggambarkan umur yang panjang dan hidup yang sehat masyarakat (BPS).

Dan sesuai hasil evaluasi capaian kinerja sasaran kedua yang memiliki 1 Indikator Kinerja, angka atau nilai rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 100.8%. Sesuai skala ordinal yang ada, predikat kinerjanya adalah **SANGAT TINGGI**. Berikut adalah hasil pengukuran kinerja indikator sasaran pembangunan daerah kedua Kota Palopo.

Tabel 3.3.7
Pengukuran kinerja sasaran II

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2019	Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja 2020 (%)	Target Akhir RP-JMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target	Realisasi			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Angka Harapan Hidup	70,79	70,34	70,88	100,8	70,4	100,68

Angka atau umur harapan hidup (AHH) di Kota Palopo tahun 2020 sebesar 70.88 Tahun. Ini lebih baik dari angka harapan hidup tahun 2019 yang berada pada angka 70.79 Tahun atau menguat 0,09 Point. Capaian ini juga melebihi target 2020 Kota Palopo yang berada pada angka 70.34 Tahun. Bahkan telah melampaui target akhir AHH di RPJMD Kota Palopo pada tahun 2023.

Capaian Umur Harapan Hidup 2020 Kota Palopo, juga lebih tinggi dibandingkan Rata-Rata Umur Harapan Hidup Sulsel 2020 yang berada pada angka 70.57 Tahun. Dan menempati peringkat keempat UHH setelah Toraja Utara (73.39 Tahun), Kota Makassar (72.09 Tahun) dan Kota Pare-Pare (71.27 Tahun). Di Luwu Raya, AHH Kota Palopo masih lebih tinggi dibandingkan AHH Kabupaten Luwu 2020 yakni 70.34 Tahun, Luwu Utara (68.51 Tahun), Luwu Timur (70.53 Tahun),

Ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kota Palopo terus membaik dan terus kompetitif di Luwu Raya. Olehnya jika diukur kinerjanya, rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran kedua sebesar **100.8%** dengan nilai kinerja capaian

sasaran diperoleh nilai sebesar **100.8%** atau memiliki predikat **Sangat Tinggi/Sangat Berhasil**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasaran kedua nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian sasaran, sebab sasaran kedua hanya memiliki 1 IKU.

Selain angka harapan hidup, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Palopo juga diindikasikan dengan meningkatnya angka indeks kesehatan. Indeks Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020 juga meningkat menjadi 78.28 Poin setelah di 2019 berada pada angka 78.14 poin atau meningkat sebesar 0.14. Capaian nilai indeks kesehatan ini juga melebihi target daerah 2020 yang berada pada angka 77.53 poin.

Indeks Kesehatan Kota Palopo ini, juga masih berada diatas rata-rata angka indeks kesehatan sulsel yakni 77.80 poin, Kabupaten Luwu 77.45, Luwu Utara 74.63, Luwu Timur 77.74. sehingga di luwu raya, Indeks Kesehatan Kota Palopo masih menjadi yang tertinggi. Meski demikian indeks kesehatan Kota Palopo masih berada di bawah Indeks Kesehatan Kota Makassar 80.14, Kota Pare-Pare 78.88 dan Kabupaten Toraja Utara 82.14 poin.

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2020 mengalokasikan belanja sebesar Rp. **280,626,197,807 dan terealisasi senilai Rp. 265,276,831,053,-** atau **94.53% dan mampu menghasilkan kinerja sasaran sebesar 100.8 %**. Anggaran tersebut dilaksanakan dalam bentuk 14 Program oleh 3 Perangkat Daerah yakni Dinas Kesehatan, BLUD RSUD Tipe B Sawerigading, dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Ini bermakna bahwa realisasi kinerja yang bisa dicapai Pemerintah Kota Palopo masih lebih besar, daripada realisasi keuangan. Sebab kinerja sasaran kedua berada pada angka 100.8% sementara realisasi keuangan hanya pada angka 94.53 %.

Tabel 3.3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II
dengan Kinerja Keuangan

Tahun	Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)	Anggaran
2020	100.8	94.53	265,276,831,053
2019	100.7	95.47	208,796,388,473

Dibandingkan kinerja tahun 2019, dimana tingkat kinerja pencapaian sasaran pada angka 100,7% dengan kinerja anggaran 95.47%, ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Pemerintah Kota Palopo terus mampu meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan kedua ini lebih baik dari tahun lalu, meski dengan dukungan dana yang lebih besar, mengingat dampak pandemi covid 19. Berikut adalah table program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran kedua meningkat-

nya Angka Harapan Hidup.

Tabel 3.3.9
Program dan Realisasi Keuangan Sasaran II

Program	Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi
Dinas Kesehatan			
Program Pelayanan Kesehatan Balita	130,000,000	129,944,874	99.96
Program Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4,980,000	4,980,000	100.00
Program Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	750,000	0	0.00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2,725,861,780	2,647,096,700	97.11
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	18,969,810,152	18,912,220,000	99.70
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	12,422,073,663	11,278,145,655	90.79
Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan	97,928,642	94,496,200	96.49
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	839,492,000	837,055,500	99.71
Program Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan	2,811,899,800	2,782,887,099	98.97
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan	38,622,582,493	32,989,691,604	85.42
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik	12,420,519,109	11,975,808,410	96.42
RSUD Sawerigading			
Program Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan	156,264,940,854	148,884,057,801	95.28
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan	35,225,809,314	34,653,632,210	98.38
Dinas Pemuda & Olahraga			
Program Pembinaan dan Pemasyaraktan Olahraga	89,550,000	86,815,000	96.95
Jumlah	280,626,197,807	265,276,831,053	94.53%

Sasaran III : Meningkatnya derajat kesejahteraan social masyarakat (S.3)

Indikator meningkatnya derajat kesejahteraan social masyarakat Kota Palopo adalah persentase penduduk miskin yang capaian kinerjanya pada tahun 2020 berada pada angka 7.85%, belum memenuhi target daerah 2020 yang berada pada angka 7.64%. dengan kondisi ini, Pemerintah Kota Palopo hanya mampu merealisasikan kinerja pada sasaran ini sebesar 97.32%.

Tabel 3.3.10
Capaian Kinerja Indikator Sasaran III

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET	REALISASI		
Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.64	7.85	97.32	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				100.8	Sangat Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN III				100.8	Sangat Tinggi

Bila dibandingkan tahun 2019, capaian kinerja persentase penduduk miskin Kota Palopo tahun 2020, belum lebih baik, sebab persentase penduduk miskin justru lebih besar atau meningkat dibandingkan setahun yang lalu. Demikian halnya dengan jumlah penduduk miskin Kota Palopo yang pada 2020 sebanyak 14.710 jiwa (7,85 persen), naik 340 jiwa dibandingkan kondisi Tahun 2019 yang sebesar 14.370 jiwa (7,82 persen).

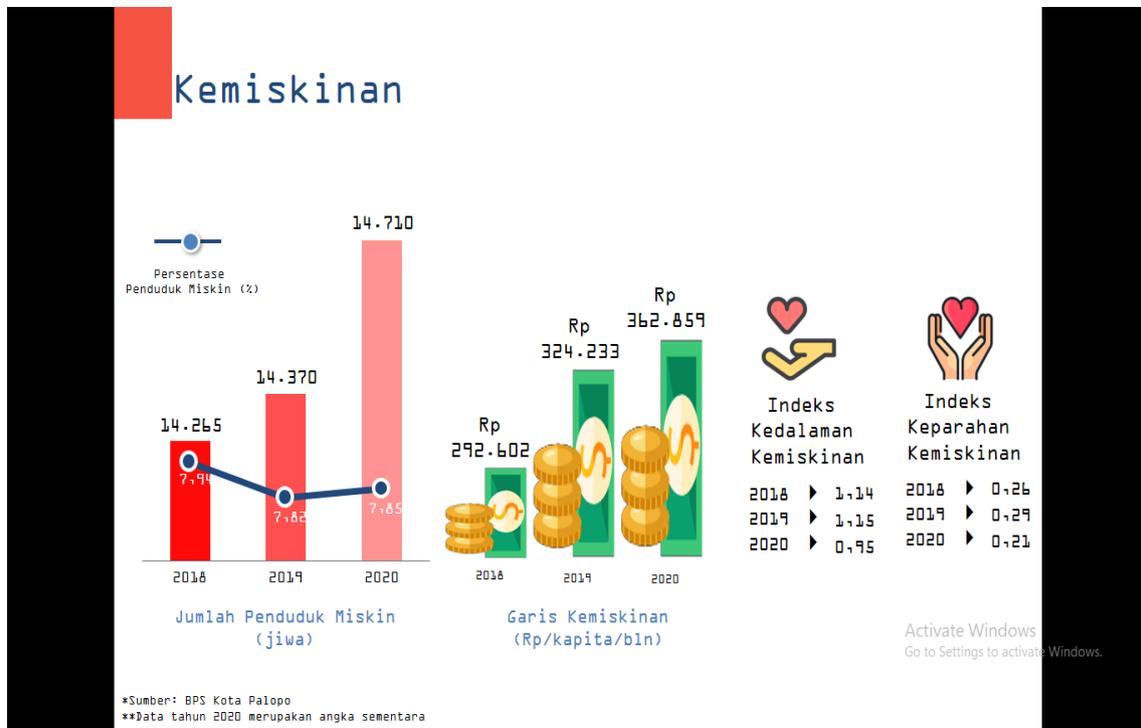
Tabel 3.3.11
Pengukuran Kinerja Sasaran III

INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN 2019	TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD 2023	% CAPAIAN KINERJA S.D 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD 2023 (%)
		TARGET	REALISASI			
Persentase Penduduk Miskin (%)	7.82	7.64	7.85	97.32%	6.08	77.45

Meski demikian, persentase penduduk miskin Kota Palopo 2020 ini masih lebih baik daripada rata-rata persentase penduduk miskin Sulsel yang berada pada angka 8.72% (Maret 2020) dan nasional 9.78%. Persentase penduduk miskin di Kota Palopo berada pada peringkat 10 (sepuluh) dimana tingkat kemiskinan tertinggi diduduki oleh Kabupaten Jeneponto dengan persentase penduduk miskin sebesar 14,58 persen, Kabupaten Pangkajene Kepulauan sebesar 13,96 persen dan Kabupaten Luwu Utara sebesar 13,41 persen.

Selain persentase dan jumlah penduduk miskin yang meningkat, Garis kemiskinan Kota Palopo pada Maret 2020 juga meningkat, dari Rp. 324,233,- per kapita per bulan di tahun 2019 menjadi Rp 362.859,- per kapita per bulan di Tahun 2020. Meski demikian,

Indeks kedalaman kemiskinan Kota Palopo Maret 2020 menurun 0,20 poin dari 1,15 menjadi 0,95 dibanding Maret 2019. Demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Palopo Maret 2020 turun 0,08 poin dari 0,29 menjadi 0,21 dibanding periode sebelumnya, 2019.



Menurunnya kinerja sasaran pembangunan ketiga yang ditandai dengan meningkatnya penduduk miskin di Kota Palopo tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya garis kemiskinan Kota Palopo dari Rp. 324.233 ribu per kapita/bulan tahun 2019 menjadi Rp.362.859 per kapita per bulan pada tahun 2020, menyebabkan semakin banyak warga masyarakat kota Palopo yang akhirnya hidup dibawah garis kemiskinan dan kemudian menyandang status penduduk miskin.
- Pembatasan social berskala besar dalam rangka menyikapi pandemi covid 19 telah menghambat sebagian besar aktifitas berusahnya untuk mendapatkan pendapatan bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kondisi ini sangat dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, terutama buruh tani, buruh kontruksi dan nelayan serta pekerja di sector informal lainnya. Buruh tani yang diupah harian pada lapangan usaha pertanian, tidak dapat bekerja karena pemilik lahan juga menunda aktifitas produksinya. Ini juga dirasakan oleh kelompok nelayan, yang produksinya tidak mampu diserap oleh pasar, karena konsumsi rumah tangga yang tertahan. Semuanya kemudian berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.
- Demikian pula dengan buruh kontruksi yang diupah harian tidak dapat bekerja, akibat penundaan sejumlah proyeksi kontruksi dan investasi di daerah yang dire-

schedule ulang oleh investornya akibat pembatasan social berskala besar tersebut.

- Penutupan sejumlah usaha sector informal akibat sepi nya konsumen yang diikuti pemutusan hubungan kerja terutama bagi tenaga kerja harian lepas, juga memberi andil dalam peningkatan angka kemiskinan. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang terlibat dalam usaha tersebut sebagai tenaga kerja harian lepas. Termasuk pekerja informal di sector transportasi dan akomodasi, pariwisata dan perhotelan.
- Semakin terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha menyebabkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

Upaya pemerintah Kota Palopo untuk mengurangi dampak pandemic covid 19 pada tahun 2020 adalah merealokasi sejumlah anggaran menjadi belanja tidak terduga yang diarahkan pada upaya perlindungan social masyarakat yang diuraikan sebagai berikut :

- Bantuan bagi sebanyak 3.876 kepala keluarga berupa bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya senilai Rp. 400.000,-
- Penyaluran sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemic covid 19 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pelaku usaha UMKM sebanyak 6000 Paket senilai Rp. 3.6 Milyar
 2. Pekerja yang Di PHK akibat pandemic sebanyak 2086 orang senilai Rp. 1.2 Milyar.
 3. Bantuan bagi pelaku usaha sector pariwisata sebanyak 265 Paket senilai 159 Juta

Selain bantuan dalam belanja tak terduga diatas, pada tahun 2020, Pemerintah Kota Palopo juga melaksanakan sejumlah program penanggulangan kemiskinan yang berada di sejumlah perangkat daerah. Total jumlah dana yang dialokasikan Pemerintah Kota Palopo untuk program mencapai sasaran ini sebanyak Rp. 21.192.770.260 dengan realisasi sebesar Rp. 20.232.388.542 (95.47%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3.12

Program dan Realisasi Keuangan Sasaran ke III

Program	Perangkat Daerah	Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi
Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Dinas Sosial	46,830,200	46,830,200	100.00
Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Dinas Sosial	8,190,200	8,190,200	100.00
Program Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Dinas Sosial	70,200,000	70,200,000	100.00
Program Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Dinas Sosial	1,700,000	1,700,000	100.00

Program	Perangkat Daerah	Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasaca Bencana Bagi Korban Bencana Kab/ Kota	Dinas Sosial	187,840,710	187,696,150	99.92
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan	Dinas Sosial	33,287,000	29,887,000	89.79
Program Bantuan Non Tunai	Dinas Sosial	131,900,000	131,893,450	100.00
Program Pemberdayaan dan Pembinaan Fakir Miskin dan Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial	2,624,700,000	2,624,700,000	100.00
Program Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan	97,541,800	97,490,800	99.95
Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan	402,396,900	401,378,900	99.75
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Dinas Perumahan	32,866,200	32,828,200	99.88
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Perumahan dan permukiman	Dinas Perumahan	155,670,000	124,814,150	80.18
Program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	Dinas PP & KB	1,544,029,960	1,541,841,200	99.86
Program Keluarga Sejahtera	Dinas PP & KB	16,869,650	16,753,000	99.31
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Keluarga Berencana	Dinas PP & KB	3,220,530,000	2,772,920,865	86.10
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas PP & PA	127,341,590	127,239,000	99.92
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam pembangunan	Dinas PP & PA	252,835,800	252,632,389	99.92
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	91,460,020	91,255,000	99.78
Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	71,898,300	71,837,150	99.91
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan	18,180,000	18,180,000	100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	1,404,806,000	1,013,636,825	72.15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian	37,710,000	37,690,000	99.95
Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Pemasaran Hasil pertanian	Dinas Pertanian	691,429,835	624,747,150	90.36
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana DAK Bidang Pertanian	Dinas Pertanian	212,539,780	212,539,780	100.00

Program	Perangkat Daerah	Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi
Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Pemasaran Hasil perkebunan	Dinas Pertanian	257,695,000	257,452,000	99.91
Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan	Dinas Pertanian	2,438,422,915	2,423,406,733	99.38
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Dinas Ketapang	42,966,400	41,766,400	97.21
Program Peningkatan Produktifitas Kawasan Hunian dan Lingkungan pemukiman	Dinas Ketapang	22,432,000	22,377,000	99.75
Belanja Tidak Terduga	BPKAD	6,948,500,000	6,948,500,000	100.00
Jumlah		21,192,770,260	20,232,383,542	95.47

Berikut adalah perbandingan tingkat realisasi kinerja indicator sasaran pembangunan ketiga dengan tingkat realisasi kinerja keuangan program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2020 :

Tabel 3.3.13

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran III dengan Kinerja Keuangan

Tahun	Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)	Anggaran
2020	97.32	95.47	20.232,383.542
2019	103.60	88.82	40,580,936,807

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, tingkat realisasi kinerja sasaran 3 hanya berada pada posisi 97.32%, masih lebih besar dibandingkan dengan tingkat realisasi kinerja keuangan sebesar 95.47 %. Dari aspek kinerja, capaian 2020 (97.32%) tentu belum lebih baik dibandingkan tahun 2019. Tetapi dari aspek keuangan, jumlah anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah, jauh lebih efisien dengan tetap mampu mencapai kinerja 97.32%.

Berangkat dari kondisi ini, untuk terus berupaya menekan besaran penduduk miskin di Kota Palopo, upaya terpadu dan sinergi akan tetap menjadi prasyarat utama dalam penanganannya, dengan tidak menjadikan satu perangkat daerah saja sebagai *solution maker* penanganan kemiskinan. Upaya upaya tersebut adalah :

- Menjadikan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai target sasaran penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo.
- Memastikan masyarakat miskin memiliki akses pada pangan dan kesehatan,

bahkan terus berkembang pada layanan sesuai standar pelayanan minimal bidang pendidikan, perumahan, serta social. Salah satunya adalah pembuatan rumah pangan yang menyediakan Sembilan bahan pokok, sesuai harga pada tingkat distributor, yang pengelolaannya dilakukan Dinas Perdagangan Kota Palopo.

- Strategi penanggulangan kemiskinan diarahkan pada beberapa aspek yakni meringankan beban pengeluaran penduduk miskin, memberdayakan masyarakat miskin, memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan mengembangkan keberdayaan mereka dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.
- Penanganan sasaran penanganan kemiskinan diarahkan pada skala perorangan, skala rumah tangga, skala komunitas dan skala usaha dan ekonomi masyarakat miskin.
- Beberapa proyek strategis penanganan kemiskinan di Kota Palopo adalah bantuan rastra daerah, (tidak termasuk rastra dari APBN), bantuan pembayaran premi kesehatan per jiwa penduduk miskin (diluar Program Penerima Bantuan Iuran APBN), bantuan bedah rumah untuk keluarga/rumah tangga miskin, penanganan kawasan kumuh dimana komunitas masyarakat miskin menetap, dan pemberdayaan dan pelatihan usaha bagi masyarakat miskin, dsb.

Penanganan kemiskinan juga diarahkan dengan upaya pengendalian penduduk melalui program KB keluarga miskin, pembinaan keluarga dan pengarusutamaan gender dengan sasaran masyarakat miskin, dsb.

Sasaran IV : Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)

Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan di Kota Palopo 2020 ditandai dengan menurunnya persentase luas kawasan kumuh. Jika tahun 2019 berada pada angka 0,15 (100%), pada tahun 2020 luas kawasan kumuh menurun menjadi 0,02 Ha atau (100%). Ini menunjukkan bahwa pencapaian sasaran IV, berada pada angka 100% dari target 2020.

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran keempat sebesar 100 dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar 100 atau memiliki predikat Sangat Tinggi. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasaran keempat nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian sasaran, sebab sasaran keempat hanya memiliki 1 IKU.

Tabel 3.3.14
Capaian Kinerja Indikator Sasaran IV

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET	REALISASI		
Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	0	0.02	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				100	Sangat Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN III				100	Sangat Tinggi

Untuk mengetahui posisi kinerja 2020 terhadap target akhir RPJMD, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3.15
Pengukuran kinerja sasaran IV

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2019	Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja 2020 (%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target	Realisasi			
Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan (S.4))	Persentase areal kawasan kumuh	0,15	0	0,02	100,00	0	100,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian 2020 telah memenuhi 100% target akhir RPJMD 2023. Kinerja penanganan kawasan kumuh di Kota Palopo digambarkan sebagai berikut :

- Tahun 2014 sesuai SK Walikota luas kumuh Kota Palopo yaitu 89.33 Ha.
- Tahun 2018, luas kawasan kumuh di Kota Palopo menurun menjadi 20,85 Ha.
- Tahun 2019 luas kawasan kumuh tersisa 3.85 Ha
- Tahun 2020 luas kawasan kumuh tersisa 1.79 Ha

Beberapa aspek yang menguatkan kinerja penanganan kawasan kumuh di Kota Palopo adalah :

- Penanganan kawasan kumuh di Kota Palopo dilaksanakan secara bersinergi pada beberapa perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melaksanakan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana perumahan pemukiman
- Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana ke PU-an skala lingkungan dan kawasan
- Dinas Ketahanan Pangan mengedukasi masyarakat tentang pemanfaatan lingkungan yang selain bebas kumuh namun juga produktif
- Dinas Lingkungan Hidup menangani kebersihan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan tetap bersih
- Pelaksanaan Program dan Pendampingan Kotaku di sejumlah kelurahan di Kota Palopo
- Perencanaan penanganan kawasan kumuh dilaksanakan berbasis masyarakat secara partisipatif.

Tabel 3.3.16

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran IV dengan Kinerja Keuangan

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
100	47,47

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2020 mengalokasikan belanja sebesar Rp. 196,379,055,230,- yang dikelola oleh 5 Perangkat Daerah (20 Program) dengan realisasi sebesar Rp 93,229,828,468,- atau 47,47%

Jika persentase realisasi keuangan tersebut dibandingkan dengan realisasi tingkat pencapaian sasaran yang berpredikat rendah (47,47%). Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh rencana pinjaman sebesar 100 milyar lebih yang belum sempat terealisasi, tetapi sudah tercantum dalam APBD 2020. Sehingga jika tanpa pinjaman, maka realisasi yang sebenarnya adalah 85,38%.

Berikut adalah tabel program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran keempat meningkatkan kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan

Tabel 3.3.17
Program dan Realisasi Keuangan Sasaran IV

Program	Pagu	Realisasi	% Tingkat Realisasi
Program Rumah Layak Huni	97,541,800	97,490,800	99.95
Program Pengembangan Perumahan	402,396,900	401,378,900	99.75
Program Lingkungan Sehat Perumahan	32,866,200	32,828,200	99.88
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman	155,670,000	124,814,150	80.18
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	56,631,191,070	56,031,930,398	98.94
Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	1,119,620,000	1,116,401,547	99.71
Program Pembangunan/Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong	1,147,850,000	1,142,857,830	99.57
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	200,000,000	72,624,850	36.31
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	70,109,020	69,532,100	99.18
Program Pengembangan, Pengelolaan, Konversi Sungai, dan Sumber Daya Air Lainnya	50,000,000	49,152,600	98.31
Program Pengendalian Banjir	91,200,000	0	0
Program Pembangunan Infrastruktur Publik/Strategis Daerah	107,718,085,000	5,564,120,322	5.17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi	2,592,718,774	2,560,964,158	98.78
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi	1,147,645,000	1,114,671,609	97.13
Program Penataan, Pengawasan, dan Pengendalian Tata Ruang	322,044,140	317,497,497	95.59

Program	Pagu	Realisasi	% Tingkat Realisasi
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	42,966,400	41,766,400	97.21
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	10,703,697,326	10,685,991,189	99.83
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	294,432,000	293,262,400	99,60
Program Pelayanan Pemakaman Dan Pengelolaan Pertamanan	3,571,193,600	3,570,377,650	99.98
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	9,987,828,000	9,942,165,868	99.54
Rata-Rata Realisasi Keuangan	196,379,055,230	93,229,828,468	47,47

Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Palopo untuk mencapai sasaran ini sebanyak 196,37 Milyar termasuk rencana pinjaman 100 milyar lebih. Sehingga tingkat realisasi dapat dicapai sebesar 85.38%, jika tidak termasuk rencana pinjaman.

Sasaran V : Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran kelima sebesar 107,75 dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar 107,75 atau memiliki predikat **Sangat Tinggi**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasarankelima nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian sasaran, sebab sasaran kelima hanya memiliki 1 IKU

Tabel 3.3.18
Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan V

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET	REALISASI		
Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	Indeks Layanan Jalan	67.75	73,00	107,75	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				107,75	Sangat Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN V				107,75	Sangat Tinggi

Tabel 3.3.18 diketahui capaian kinerja sasaran pembangunan daerah ke 5 yaitu 107,75 %. Dimana indikator kinerja sasarannya adalah Indeks Layanan Jalan, target tahun 2020 adalah sebesar 67,75 sedangkan realisasi hingga akhir tahun 2020 adalah sebesar 73,00. Ini berarti bahwa capaian kinerja tahun 2020 telah melebihi target yang telah ditetapkan sehingga predikat capaian adalah **Sangat Tinggi**

Untuk mengetahui posisi kinerja 2020 terhadap target akhir RPJMD, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3.19
Pengukuran kinerja sasaran V

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2019	Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja 2020(%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target	Realisasi			
Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategi daerah (S.5)	Indeks Layanan Jalan	67,51	67,75	73,00	107,75	68,75	106,18

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2020 melebihi 106,18% target akhir RPJMD 2023. Pemerintah Kota Palopo sangat optimis mampu melampaui target yang telah di tetapkan di RPJMD pada akhir tahun 2023 nanti. Realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 73,00 merupakan lonjakan yang cukup besar dibandingkan capaian tahun 2019 yang hanya pada poin 67,51. Tetapi tentunya capaian ini akan terus ditingkatkan di masa – masa yang akan datang.

Sasaran pembangunan daerah yang ke 5 ini dikontribusi oleh capaian indikator Indeks Layanan Jalan. Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah jaringan terhadap jumlah wilayah-wilayah yang terhubung. Berdasarkan analisis melalui data Dinas Perhubungan yang ada, didapatkan angka 73,00 atau lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2020. Oleh karena itu, tingkat capaian 2020 mencapai 107,75%, atau 106,18% jika dibandingkan dengan target RPJMD 2023.

Tabel 3.3.20
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran V dengan Kinerja Keuangan

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
107.75	38.80

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2020 mengalokasikan belanja sebesar Rp. 168.635.093.634,- yang dikelola oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah (7 Program) dengan realisasi sebesar Rp 65.425.580.228,- atau 38,80%. Rendahnya persentase realisasi keuangan ini disebabkan adanya rencana pinjaman sebesar 100 milyar lebih yang tidak terealisasi. Jika tidak terdapat pinjaman, maka persentase realisasi adalah sebesar 68.98%.

Jika persentase realisasi keuangan tersebut dibandingkan dengan realisasi tingkat pencapaian sasaran yang berpredikat sangat tinggi (107.75%), maka dapat dikatakan, Pemerintah Kota Palopo mampu mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya atau dengan kata lain kinerja sasaran lebih besar daripada kinerja keuangan

Berikut adalah tabel program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran pembangunan daerah yang kelima yaitu meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategi daerah.

Tabel 3.3.21
Program dan Realisasi Keuangan Sasaran V
Tahun 2020

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program pembangunan jalan dan jembatan	56,631,191,070	56,031,930,398	98.94
Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	200,000,000	72,624,850	36.31
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	107,718,085,000	5,564,120,322	5.17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi	2,592,718,774	2,560,964,158	98.78
Program Pembangunan, Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	27,138,090	27,138,000	100.00
Program Peningkatan Pelayanan	938,786,700	938,770,500	100.00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	527,174,000	230,032,000	43.63
Rata-Rata Realisasi Keuangan	168,635,093,634	65,425,580,228	38.80

Sasaran VI : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran keenam sebesar 61,34 dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar 61,34 atau memiliki predikat rendah. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasaran ketujuh nilai capaian sasaran diolah menggunakan metode rata-rata data kelompok, sebab sasaran keenam memiliki 2 IKU.

Tabel 3.3.22
Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah VI

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET	REALISASI		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	15	54.95	22.53	Sangat Rendah
	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	76.93	76.95	100.16	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				61.35	Sedang
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN VI				61.35	Sedang

Sasaran ini memiliki dua indikator, yakni luas kawasan terdampak banjir dan persentase luas ruang terbuka hijau. Luas kawasan terdampak banjir didapatkan berdasarkan riwayat kejadian banjir di Kota Palopo selama tahun 2020. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan, didapatkan beberapa kejadian banjir di 2 (dua) kelurahan di Kecamatan Telluwanua, yaitu Kelurahan Pentojangan (16.2 Ha) dan Kelurahan Salubatang (38.75 Ha). Total areal yang terdampak banjir adalah 54.95 ha. Capaian ini jauh dari target 2020 yang menargetkan 15 ha areal terdampak banjir.

Sementara itu, indikator kedua adalah persentase luas ruang terbuka hijau. Target Nilai Indikator Ruang Terbuka Hijau Publik Tahun 2020 adalah sebesar 76,93 dan terealisasi sebesar 76,95 sehingga capaian kinerjanya adalah 100,16%. Pencapaian yang melampaui target pada tahun 2019, adalah merupakan upaya dan bentuk komitmen pemerintah Kota Palopo dalam mewujudkan Palopo sebagai kota yang hijau. Bentuk dan dukungan Kuat Walikota dibuktikan dengan adanya alokasi anggaran di TA 2020, baik untuk penambahan luasan RTH berupa pembangunan taman.

Untuk mengetahui posisi kinerja 2020 terhadap target akhir RPJMD, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3.23
Pengukuran kinerja sasaran VI

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2019	Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja 2020(%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target	Realisasi			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Luas Kawasan Terdampak Banjir	12,38	15	54,95	22,53	2	3,64
	Persentase Luas ruang terbuka hijau	76,95	76,93	76,95	100,16	77,20	99,68

Dari tabel 3.3.23 diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2020 untuk indikator Luas kawasan terdampak banjir adalah 54,95. Capaian ini jauh diatas target tahun 2020 yang telah ditetapkan di RPJMD yaitu 15 Ha. Capaian ini berarti jauh lebih buruk dibandingkan capaian tahun 2019 yang hanya pada 12,38 Ha. Namun jika di bandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaian ini semakin jauh diatas target yaitu sebesar 3.64%.

Untuk indikator yang kedua yaitu persentase luas ruang terbuka hijau realisasi kinerja tahun 2020 yaitu 76,95. Capaian ini sedikit diatas target tahun 2020 yang telah ditetapkan di RPJMD yaitu 76,93 Ha sehingga capaian kinerjanya adalah 100,16 %. Namun jika di bandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaian ini masih sedikit di bawa target akhir yaitu 77,2 Ha atau sekitar 99,68% dari target akhir RPJMD.

Pencapaian yang melampaui target pada tahun 2019 adalah merupakan upaya dan bentuk komitmen pemerintah Kota Palopo dalam mewujudkan Palopo sebagai kota hijau. Bentuk dan dukungan kuat Walikota dibuktikan dengan adanya alokasi anggaran di tahun anggaran 2020 untuk penambahan luasan RTH berupa pembangunan taman-Beberapa permasalahan yang ditemui dalam upaya pencapaian target antara lain :

1. Selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara belum sesuai karena adanya kendala proses pembebasan lahan pada kegiatan pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau yang belum dapat direalisasikan

2. Belum semua RTH yang berfungsi optimal karena:
 - a. Status kepemilikan dan kewenangan pengelolaan lahan RTH yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Kota;
 - b. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam merawat dan memelihara RTH yang disediakan oleh pemerintah.

Sementara upaya tindak lanjut yang dilakukan yakni, Perlunya penyusunan strategi yakni:

- a. Penentuan prioritas jenis RTH yang perlu dibangun serta lokasi berdasarkan analisa kebutuhan;
- b. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Kantor ATR BPN dalam rangka upaya percepatan pembebasan lahan, mengingat target penambahan RTH dibangun dan dipelihara;
- c. Melakukan analisa permasalahan secara rutin untuk target lokasi dan luasan yang seharusnya dioptimalkan namun belum tercapai, sehingga dapat diketahui akar permasalahan serta upaya yang perlu segera dilakukan.

Tabel 3.3.24
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran VI
dengan Kinerja Keuangan

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
61.35	99,30

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2020 mengalokasikan belanja sebesar Rp. 19.892.755.840,- yang dikelola oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui 9 (Sembilan) Program dengan realisasi sebesar Rp 19.736.504.871 atau 99,30%

Jika persentase realisasi keuangan tersebut dibandingkan dengan realisasi tingkat pencapaian sasaran yang berpredikat Sedang (61,35%), maka dapat dikatakan, Pemerintah Kota Palopo masih belum mampu mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya atau dengan kata lain kinerja sasaran lebih kecil daripada kinerja keuangan

Berikut adalah tabel program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran pembangunan daerah yang keenam yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 3.3.25
Program dan Realisasi Keuangan Sasaran VI

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1,119,620,000	1,116,401,547	99.71
Program pembangunan turap/talud/bronjong	1,147,850,000	1,142,857,830	99.57
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	50,000,000	49,152,600	98.31
Program Pengendalian Banjir	91,200,000	0	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi	2,592,718,774	2,560,964,158	98.59
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	322,044,140	317,497,497	95.69
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	10,703,697,326	10,685,991,189	99.83
Program Pelayanan Pemakaman Dan Pengelolaan Pertamanan	3,571,193,600	3,570,377,650	99.98
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	294,432,000	293,262,400	99.60
Rata-Rata Realisasi Keuangan	19.892.755.840	19.736.504.871	99,30

Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Palopo untuk mencapai sasaran ini sebanyak 19,89 Milyar dengan tingkat realisasi sebanyak 99,30%. Kinerja yang mampu direalisasi pada sasaran ini hanya mencapai 61,34 %. Artinya realisasi kinerja yang dihasilkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kinerja keuangan yang dipakai.

Sasaran VII : Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran ketujuh sebesar **84,95** dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar **84,95** atau memiliki predikat **Tinggi**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasaran ketujuh nilai capaian sasaran diolah menggunakan metode rata-rata data kelompok.

Tabel 3.3.26
Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah VII

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET	REALISASI		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah(Nilai)	75	52,43	69,90	Sedang
	Level SPIP Daerah (Point)	3	3	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				84,95	Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN VI				84,95	Tinggi

Sampai saat laporan ini disusun nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah belum dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga nilai yang tertera pada laporan ini adalah nilai perolehan tahun 2019, yaitu 52,43. Berbeda halnya dengan Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2020 memperoleh level 3 (terdefinisi), masih sama pada tahun 2019. Dengan demikian level SPIP Daerah Kota Palopo telah mencapai target.

Dari tabel 3.3.26 diatas dapat diketahui bahwa nilai capaian sasaran 7 adalah 84,95 dengan predikat tinggi yang merupakan nilai rata – rata capaian kinerja sasaran 7 yang di ambil dari tingkat capaian kinerja tiap indikator kinerja. Untuk mengetahui posisi kinerja 2020 terhadap target akhir RPJMD, disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.3.27
Pengukuran kinerja sasaran VII

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2019	Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja 2020(%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target	Realisasi			
Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan (S.7)	Nilai Akuntabilitas pemerintahan daerah	52,43	75	52,43	69,90	85	61,7
	Level SPIP daerah	3	3	3	100	3	100

Dari tabel 3.3.27 diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2020 untuk indikator nilai akuntabilitas pemerintahan daerah adalah 52,43. Capaian ini jauh dibawah target tahun 2020 yang telah ditetapkan di RPJMD yaitu 75. Capaian tahun 2020 hanya pada 52,43. Jika di dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaian ini masih mengkontribusi sebesar 61,7%.

Untuk indikator yang kedua yaitu level SPIP realisasi kinerja tahun 2020 yaitu 3. Capaian ini telah mencapai target tahun 2020 yang telah ditetapkan di RPJMD yaitu nilai 3, sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dan capaian ini juga telah mencapai target tahun terakhir RPJMD.

Tabel 3.3.28

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran VII dengan Kinerja Keuangan

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
87,45	96,26

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2020 mengalokasikan belanja sebesar Rp. 10,904,939,495,- yang dikelola oleh 6 Perangkat Daerah yaitu Setda, Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Dinas Persandian dan Statistik dan BKPSDM melalui 10 Program dengan realisasi sebesar Rp 10,648,376,949,- atau 96,26%.

Melihat tabel 3.3.28 diketahui bahwa capaian kinerja sasaran 7 belum optimal walaupun telah disertai dengan penganggaran yang cukup. Namun di tahun – tahun men-

datang Pemerintah Kota Palopo berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Palopo.

Berikut adalah tabel program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran pembangunan daerah yang ketujuh yaitu meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 3.3.29
Program dan Realisasi Keuangan Sasaran VII

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	20,375,000	20,325,000	99.75
Program Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	318,571,470	313,959,158	98.55
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	659,286,600	640,919,077	97.21
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah	5,935,315,000	5,858,102,929	98.70
Program Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1,109,140,000	1,098,873,375	99.07
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	1,604,400,000	1,595,512,100	99.45
Program Tata Laksana Kelembagaan, Reformasi Birokrasi dan Layanan public	661,166,580	658,643,710	99.62
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	18,950,000	18,518,000	97.72
Program Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Sumber Daya aparatur	488,594,845	354,383,600	72.53
Program Pengembangan Statistik Sektoral	89,140,000	89,140,000	100.00
Rata-Rata Realisasi Keuangan	10,904,939,495	10,648,376,949	96.26

Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Palopo untuk mencapai sasaran ini sebanyak 10,90 Milyar dengan tingkat realisasi sebanyak 96.26%. Kinerja yang mampu direalisasi pada sasaran ini mencapai 87,45 %. Artinya realisasi kinerja yang dihasilkan masih lebih kecil dibandingkan dengan kinerja keuangan yang dipakai, sehingga Pemerintah Kota Palopo belum mampu melaksanakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang digunakan.

Sasaran VIII : Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran delapan sebesar **102.39** dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar **102.39** atau memiliki predikat **Sangat Tinggi**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasaran kedelapan nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian sasaran.

Tabel 3.3.30

Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah VIII

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET	REALISASI		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8))	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	81,12	83,06	102,39	Sangat Berhasil
RATA-RATA CAPAIAN IKU				102,39	Sangat Berhasil
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN VI				102,39	Sangat Berhasil

Sesuai RPJMD Kota Palopo 2018-2023, Indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelayanan publik adalah Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan publik yang diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 menurun dari 83.08 menjadi 83,06. Hal ini berarti menurun sebesar 0.02 %. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan baik secara mandiri maupun kerjasama dengan lembaga pendidikan.

Berikut adalah beberapa hasil survey indeks kepuasan masyarakat Tahun 2020 :

Tabel 3.3.31

Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI INDEKS	IKM	KINERJA UNIT LAYANAN	MUTU PELAYANAN
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,53	88,33	Sangat Baik	A
2	RSUD Sawerigading	3,11	77,77	Baik	B
3	Puskesmas Wara	3,27	81,83	Baik	B
4	Dinas Sosial (Rastra APBN & APBD)	-	83,24	Baik	B
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	83,00	Baik	B
6	Kecamatan Wara	3,36	84,19	Baik	B
Rata-rata			83,06	Baik	B

Berikut adalah beberapa inovasi layanan publik yang dilaksanakan pemerintah Kota Palopo tahun 2020 :

No	Nama Inovasi	Gambaran Inovasi
1	BANUA MERAH 	Singkatan dari Bantuan Anak Meraih Harapan. Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo. KIPP (Sinovik) TOP 30 SUL-SEL 2019
2	AIR DISUNTIK RESAH PUN TEROBATI 	Layanan Air Bersih Bagi Masyarakat menggunakan Tanki jika mengalami kesulitan air dari jaringan PDAM. Dilaksanakan oleh PDAM Kota Palopo. KIPP (Sinovik) TOP 99 Indonesia 2017, dan sampai hari ini terus dikembangkan layanannya
3	“SI CAKEP” 	Dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Layanan ini merupakan sistem jemput bola, terkait pembuatan akta kelahiran atas bayi yang baru lahir. Aparatur Disduk Capil akan langsung mendatangi ibu dan bayinya di rumah sakit untuk membuatkan Kartu Identitas Penduduk, misalnya akte kelahiran. Sehingga ketika keluar dari perawatan Rumah Sakit, sang bayi langsung sudah memiliki akta kelahiran.
4	SIMPONI CERIA 	Adalah singkatan dari “Sistem Pendaftaran Online, Cepat, Ringkas dan Akurat”. Pasien yang bermaksud mendapatkan pelayanan di RSUD baik pasien poliklinik, BPJS maupun regular, dimudahkan untuk mendaftar melalui aplikasi Whats Up dengan menggunakan Nama, NIK sesuai KTP. Inovasi layanan ini dilaksanakan untuk mengurangi jadwal tunggu yang ada di RSUD dan memberikan kepastian waktu pelayanan kesehatan terhadap pasien.

No	Nama Inovasi	Gambaran Inovasi
5	<p>“GO RIDE”</p> 	<p>Adalah Gerakan Optimalisasi Geriatri Terpadu dan Efektif. Layanan ini dikhususkan bagi para lanjut usia yang membutuhkan layanan kesehatan. Mengingat kemampuan fisik pasien lansia yang umumnya sudah sangat terbatas, dokterlah yang akan mendatangi pasien di poli sesuai dengan keluhan kesehatannya. Pelaksana layanan ini adalah RSUD Sawerigading.</p>
6	<p>SIPAKAINGA</p> 	<p>Sistem Paket Layanan Pasien Paru Terintegrasi. Layanan kesehatan ini khusus bagi penderita paru yang dilaksanakan secara terintegrasi. Ini diluncurkan dalam rangka memberikan “keamanan” bagi pasien lain di RSUD, terhadap keberadaan pasien dengan gangguan kesehatan yang bersifat infeksius. Olehnya pasien dengan gangguan kesehatan infeksius pelayanannya akan dipisah dengan pasien lain, termasuk dalam hal pengambilan obat. Pelaksana layanan ini adalah RSUD Sawerigading.</p>
7	<p>“BUGAR”</p> 	<p>Adalah singkatan dari “Budaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”. Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo</p>
8	<p>“BU KB”</p> 	<p>Adalah singkatan dari “Bukan Kader Biasa”. Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo</p>
9	<p>JEMPUT-ANTAR (JA)</p> 	<p>Dilaksanakan oleh UPTD Kesehatan Adalah sebuah layanan kesehatan berbasis mobile yang pelayannya</p>
10	<p>“SI MUD”</p> 	<p>Sistem yang Memudahkan yang dipraktekan oleh Kecamatan Bara</p>
11	<p>“SI ANTAR”</p> 	<p>Diinisiasi oleh Kelurahan Amassangan. Dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan public yang menjadi kewenangan kelurahan</p>

No	Nama Inovasi	Gambaran Inovasi
12	<p>MABASSA</p> 	<p>Layanan Perizinan “Mudah, Akuntabel, Bersahabat, Adil, Sederhana, Simpatik dan Aman” oleh DPMPTSP.</p>
13	<p>FOUR IN ONE</p> 	<p>Pelaksanaan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pelayanan administrasi kependuduk</p>
14	<p>“INI KAWAN”</p> 	<p>Pelaksana Oleh Inspektorat Daerah Kota Palopo. Adalah sinonim dari “Klinik Konsultasi Pengawasan”</p>
15	<p>JEMPUT-ANTAR, LAYANAN WEEKEND & TOL INFO</p> 	<p>Oleh DPMPTSP. Fokus Layanan adalah memberikan pelayanan jemput-antar berkas pengurusan perizinan</p>
16	<p>LORONG TAMAN SURG</p> 	<p>Oleh Puskesmas Kelurahan Pontap dalam menjaga kesehatan masyarakat</p>

Untuk mengetahui posisi kinerja 2019 terhadap target akhir RPJMD, disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.3.32
Pengukuran kinerja sasaran VIII

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2019	Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja 2020 (%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target	Realisasi			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	83,40	81,12	83,06	102.39	82,03	101,25

Dari tabel 3.3.32 diatas diketahui bahwa indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 adalah 83,06, indeks ini menurun 0,34 poin dibandingkan tahun 2019 yang lalu. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD maka capaian tahun 2020 ini telah mencapai 101,25% dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.3.33
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran VIII dengan Kinerja Keuangan

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
102,39	98,00

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2020 mengalokasikan belanja sebesar Rp. 179,164,934,067,- melalui 10 Program dengan realisasi sebesar Rp 170,571,921,215,- atau 98%.

Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Palopo untuk mencapai sasaran ini sebanyak 179.16 Milyar dengan tingkat realisasi sebanyak 98%. Kinerja yang mampu direalisasi pada sasaran ini mencapai 102.39 %. Artinya realisasi kinerja yang dihasilkan masih lebih besar dibandingkan dengan kinerja keuangan yang dipakai, sehingga Pemerintah Kota Palopo mampu melaksanakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang digunakan.

Tabel 3.3.34
Program dan Realisasi Keuangan Sasaran VIII

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	122,562,500	122,237,500	99.73
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	12,422,073,663	11,278,145,655	90.79
Program Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan	156,264,940,854	148,884,057,801	95.28
Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	921,320,000	896,200,000	97.27
Program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	1,544,029,960	1,541,841,200	99.86
Program Pemberdayaan dan Pembinaan Fakir Miskin dan Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	2,624,700,000	2,624,700,000	100.00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	1,604,400,000	1,595,512,100	99.45
Program Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan	2,811,899,800	2,782,887,099	98.97
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasaca Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota	187,840,710	187,696,150	99.92
Program Tata Laksana Kelembagaan, Reformasi Birokrasi dan Layanan publik	661,166,580	658,643,710	99.62
Rata-rata Realisasi	179,164,934,067	170,571,921,215	98.00

Sasaran IX : Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)

Tingkat Pengangguran Terbuka yang menjadi Indikator meningkatnya perluasan kesempatan berusaha dan produktifitas tenaga kerja di Kota Palopo pada tahun 2020, berada pada angka 10.37% (Maret 2020). Jumlah ini belum memenuhi target daerah 2020 yakni 9,51%. Dengan demikian, rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran ke sembilan sebesar **91.70** dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai

sebesar **91.70** atau memiliki predikat **Sangat Tinggi/Sangat Berhasil**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasaran kesembilan, nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian sasaran, sebab sasaran kesembilan hanya memiliki 1 IKU.

Tabel 3.3.35
Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah IX

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET	REALISASI		
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,51	10,37	91,70	Sangat Berhasil
RATA-RATA CAPAIAN IKU				91,70	Sangat Berhasil
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN V				91,70	Sangat Berhasil

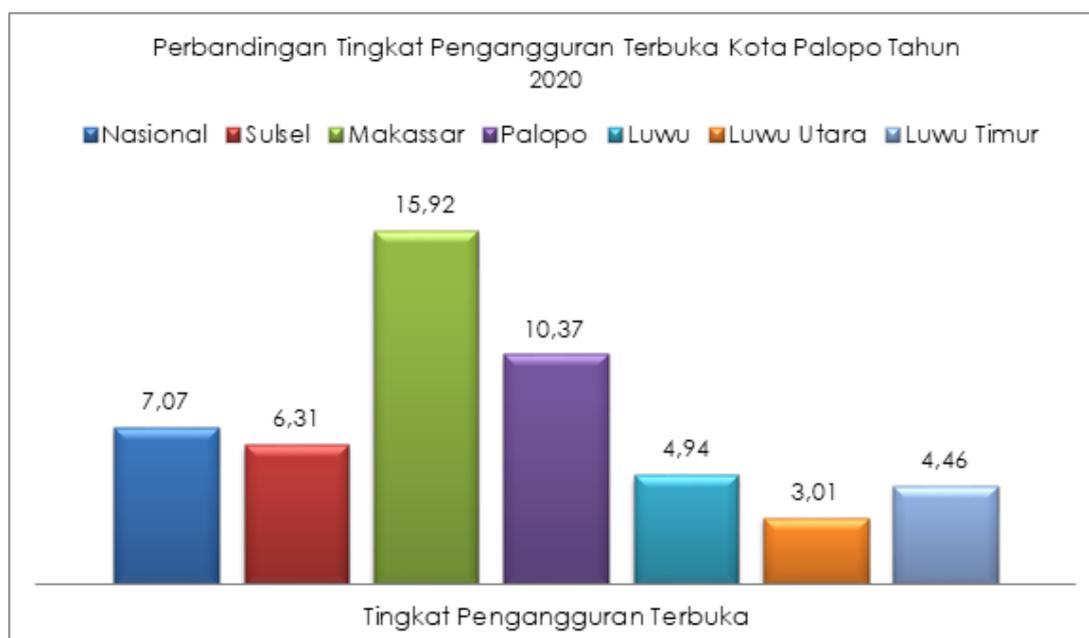
Tingkat pengangguran terbuka 2020 di Kota Palopo jumlah meningkat, dibandingkan setahun lalu. Sebab di 2019, angka tingkat pengangguran terbuka hanya pada posisi 10.32%. Tetapi sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun 2018 dimana angkanya pada posisi 11.60%. Meski demikian, kondisi 2020, memang masih berada dibawah target Kota Palopo 2020 yang berada pada angka 9.51%. Kemudian bila dibandingkan target akhir RPJMD 2023, kondisi 2020 baru memenuhi 80.71% target pengangguran terbuka pada tahun 2023 nanti.

Tabel 3.3.36
Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran IX

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2019	Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja 2020 (%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target	Realisasi			
Meningkatnya perluasan kesempatan berusaha dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	10,32	9,51	10,37	91,70	8,07	80,71

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota Lain di Sulawesi Selatan, tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo ini masih lebih baik dari Kota Makassar yang berada pada angka 15.92% (Agustus 2020). Tapi belum lebih baik dibandingkan tingkat pengangguran terbuka beberapa kabupaten yang berbatasan wilayah secara langsung dengan Kota Palopo, yakni Kabupaten Luwu (4.94%), Kabupaten Luwu Utara (3.01%) dan Kabupaten Luwu Timur (4.46%), Kota Pare-Pare (7.14%), bahkan belum lebih baik daripada -rata Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional 2020 (7.07%) Rata-Rata Sulsel (6.31%).

Grafik perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo 2020 dibandingkan dengan daerah lain di Luwu Raya.



Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Palopo tahun 2020 disebabkan beberapa kondisi sebagai berikut :

- Jumlah angkatan kerja pada s.d Agustus 2020 sebanyak 85.026 orang, bertambah sekitar 609 orang jika dibandingkan Agustus 2019. Sebaliknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun 0,71 persen menjadi 61,23 persen.
- Dalam setahun terakhir, pengangguran meningkat sebanyak 655 orang, sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat 0,70 persen menjadi 10,37 persen pada Agustus 2020.
- Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 19,61 persen.
- Penduduk yang bekerja s.d Agustus 2020 sekitar 76.211 orang, berkurang 0.06 persen dari Agustus 2019.
- Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terjadi pada sektor pertanian (3,92 persen).
- Sebaliknya, lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terjadi

pada sektor jasa (3,10 persen) dan sektor manufaktur (0,82 persen).

- Penduduk Bekerja di kegiatan formal pada Agustus 2020 sebanyak 44.2 ribu orang (58,01 persen). Sebaliknya terdapat sekitar 32,0 ribu orang (41.99 persen) penduduk bekerja di kegiatan informal.
- Selama setahun terakhir persentase penduduk bekerja di kegiatan formal mengalami penurunan 9.87 persen.
- Dampak Pandemi COVID19 terhadap ketenagakerjaan Kota Palopo Agustus 2020, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (1.994 orang), Bukan Angkatan Kerja karena Covid-19 (586 orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (962 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (11.192 orang).

Berikut adalah gambaran kondisi ketenagakerjaan Kota Palopo sampai dengan tahun 2020 :

Tabel 3.3.37

Perbandingan Kondisi tenaga Kerja 2019 dan 2020 Kota Palopo

Uraian	2019 (Ribu Orang)	2020 (Ribu Orang)	Perubahan
Penduduk Usia Kerja	136.3	138.9	2.6
Angkatan Kerja	84.4	85	0.6
Bekerja	76.3	76.2	-0.1
Pengangguran	8.1	8.8	0.7
Bukan Angkatan Kerja	51.9	53.8	1.9
Tingkat Pengangguran Terbuka	9.67	10.37	0.7
Laki-laki	10.81	11.22	0.41
Perempuan	7.95	9.07	1.12
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	61.94	61.23	-0.71
Laki-laki	76.81	76.23	-0.58
Perempuan	48.01	47.14	-0.87

Berangkat dari kondisi, beberapa upaya yang ke depan akan dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo sebagai upaya menurunkan angka pengangguran adalah sebagai berikut :

1. *Mengoptimalkan job fair yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja*
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui serangkaian pelatihan ketenagakerjaan, yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada, sehingga angkatan kerja yang ada berkualifikasi dan kompeten. Bukan hanya pada dinas tenaga kerja tapi pada dinas lainnya juga.

3. Meningkatkan jumlah dan investasi yang masuk ke Kota Palopo dengan memantapkan pelayanan perizinan usaha daerah yang lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat, melalui pelayanan terpadu satu pintu. Peningkatan investasi ini kemudian mampu menyerap dan membuka lapangan kerja.
4. Mengakselerasi pengembangan sektor informal Kota Palopo terutama Jasa dan Perdagangan, yang mampu membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang ada.
5. Mengembangkan beberapa destinasi-destinasi berusaha yang baru bagi masyarakat terutama di sector perdagangan, seiring dengan pembinaan wirausaha dan jiwa kewirausahaan dalam menciptakan dan mengembangkan skala usaha yang sudah ada. Dalam bentuk pelatihan dan fasilitasi penguatan dan pengelolaan usaha dan daya saing produk.
6. Meningkatkan jumlah dan nilai proyek infrastruktur strategis daerah yang padat karya dan menyerap tenaga kerja local, pada sejumlah perangkat daerah yang melaksanakannya. Termasuk pengelolaan dana kelurahan yang menyasar proyek-proyek berbasis swakelola masyarakat.
7. Membangun jejaring kerjasama dengan dunia usaha dan pemerintah daerah yang berbatasan terutama pengembangan kawasan strategis pada daerah perbatasan, misalnya dukungan kepariwisataan.

Perbandingan Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Sasaran sembilan

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2020 mengalokasikan belanja sebesar Rp. 1,925 Milyar yang dikelola oleh tiga perangkat daerah yakni Dinas Tenaga Kerja, Pennaman Modal, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan realisasi kinerja anggaran sebesar Rp 1,890 Milyar atau **98.16%**.

Tabel 3.3.38

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran IX dengan Kinerja Keuangan

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
91,70	98,16

Jika persentase realisasi keuangan tersebut **dibandingkan** dengan realisasi tingkat pencapaian sasaran sembilan yang berpredikat sangat berhasil (91.70%), maka dapat dikatakan, Pemerintah Kota Palopo kurang mampu mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan). Dimana realisasi kinerja lebih kecil dibandingkan realisasi keuangan.

Berikut adalah table program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran sembilan.

Tabel 3.3.39

Program dan Realisasi Keuangan Sasaran IX

	Program	Pagu	Realisasi	Realisasi %
1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	48,954,000	48,354,000	98.77
2	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	36,580,000	36,295,000	99.22
3	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	252,835,800	252,632,389	99.92
4	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	14,400,000	14,400,000	100.00
5	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	651,900,000	642,650,000	98.58
6	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	921,320,000	896,200,000	97.27
	Realisasi Kinerja	1,925,989,800	1,890,531,389	98.16

Sasaran X : Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S.10)

Indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan peningkatan produksi dan produktifitas daerah di Kota Palopo adalah meningkatnya PDRB per Kapita setiap tahunnya. Angkanya diharapkan meningkat dari tahun ke tahun.

Angka PDRB per Kapita Kota Palopo Tahun 2020 berada pada posisi 42.61 Juta/Kapita/Tahun. Posisi ini jauh melebihi atau melampaui target kinerja yang diperjanjikan tahun 2020 yang berada pada angka 37.3 Juta/Kapita/Tahun. Bahkan angkanya juga sudah melampaui target akhir PDRB per Kapita Kota Palopo pada periode akhir RPJMD 2023 yang berada pada angka 37.8 Juta/Kapita/Tahun. Sehingga realisasi kinerja terhadap target yang ditetapkan pada IKU ini pada tahun 2020 adalah 114.24%.

Tabel 3.3.40

Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah X

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET	REALISASI		
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S.10)	PDRB per Kapita (Juta/Kapita/Thn)	37.3	42.61	114.24	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				114.24	Sangat Tinggi
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT TUJUAN X				114.24	Sangat Tinggi

Melihat tabel diatas diketahui bahwa realisasi PDRB perkapita Kota Palopo melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 42,61 juta/perkapita/tahun. Tingkat capaian kinerja sebesar 114,24% atau berpredikat Sangat Tinggi

Tabel 3.3.41

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran X

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2019	Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja 2020 (%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target	Realisasi			
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas	PDRB perkapita	43,02	37,3	42,61	114,24	37,8	112,72

Jika dilihat dari perspektif angka capaian, PDRB per Kapita Kota Palopo 2020, belum lebih baik dari capaian tahun 2019. Bahkan nilai atau angkanya turun atau lebih rendah 5.31 Juta dibandingkan tahun 2019 yang berada pada angka 43.02. Berikut adalah gambaran capaian PDRB per Kapita Kota Palopo 2018-2020 :

Tabel 3.3.42
PDRB per kapita Kota Palopo tahun 2018,2019 dan 2020

Indikator	Tahun		
	2018	2019	2020
PDRB per Kapita (Juta/Kapita/Tahun)	40.32	43.02	42.01

Table diatas memperlihatkan bahwa PDRB per Kapita Kota Palopo Tahun 2020 lebih rendah atau menurun sebesar 1.01 Juta dibandingkan 2019. Ini menunjukkan bahwa tingkat produksi dan produktifitas Kota Palopo pada tahun 2020, belum lebih baik dari kondisi 2019.

Kondisi tahun 2020 juga menunjukkan, PDRB per Kapita Kota Palopo masih belum sekompetitif indikator yang sama pada level nasional, karena capaian Kota Palopo ini masih berada dibawah rata-rata PDRB per kapita nasional 2020 (56.9 Juta/Kapita/Tahun), berada dibawah Kota Pare-Pare (49.9 Juta Kapita/Tahun), bahkan juga tertinggal dengan PDRB per Kapita Kabupaten Luwu 2020 (43.85 Juta/Kapita/Tahun). Untuk melihat posisi dan seberapa kompetitif pencapaian PDRB per Kapita 2020 Kota Palopo, berikut adalah perbandingan PDRB per Kapita beberapa daerah di Sulsel Tahun 2020 :

Wilayah	Capaian PDRB per Kapita 2019 (Juta/Rupiah)	Capaian PDRB per Kapita 2020 (Juta/Rupiah)
Kota Palopo	43.02	42.01
Kota Pare-Pare	49.80	49.9
Kota Makassar	116.87	125.25
Kabupaten Luwu	43.25	43.85
Kabupaten Luwu Utara	41.70	40.99
Kabupaten Luwu Timur	70.07	70.49
Sulawesi Selatan	56.98	56.51
Nasional	59.1	56.9

Tabel diatas menunjukkan bahwa penurunan PDRB per Kapita masyarakat Kota Palopo 2019-2020 sebesar 1.01 Juta/Kapita, masih lebih baik dibandingkan dengan penurunan nilai PDRB per Kapita tingkat nasional yang turun sebesar 2.2 Juta, tapi belum lebih baik dibandingkan dengan penurunanan PDRB per Kapita Sulawesi Selatan yang hanya turun sebesar 0.47 Juta/Kapita atau Kabupaten Luwu Utara yang hanya menurun 0.71 Juta/Kapita,.

Berbeda kondisinya dengan kinerja PDRB per Kapita di di Kota Pare-Pare yang nilai PDRB per kapitanya justru meningkat sebesar 0.1 Juta/Kapita dan Kota Makassar meningkat sebesar 8.38 Juta/Kapita serta Kabupaten Luwu Timur yang juga naik 0.42 Juta.

Secara umum, kinerja upaya peningkatan PDRB per Kapita Tahun 2020 di Kota Palopo, sangat jauh tertinggal dengan kota lain di Sulsel bahkan beberapa kabupaten lain yang berbatasan, yang mampu merealisasikan peningkatan PDRB per Kapita masyarakatnya sepanjang tahun 2019-2020.

Faktor yang berpengaruh

PDRB per Kapita dipengaruhi dua factor kunci yakni, **Jumlah atau Nilai PDRB** (Harga Berlaku maupun Konstan) dan **Jumlah Penduduk**. Jika kedua angka indicator ini tumbuh dalam kondisi yang tidak seimbang, maka PDRB per kapita penduduk, dipastikan akan turun. Olehnya upaya peningkatan PDRB yang dibarengi upaya pengendalian penduduk secara seimbang menjadi kunci dasar dalam meningkatkan PDRB per Kapita Penduduk.

Pada tahun 2019-2020, laju pertumbuhan penduduk hanya berkurang 0.1% yakni dari 2.18 % tahun 2019 menjadi 2.17% pada tahun 2020. Sementara disisi lain, angka pertumbuhan nilai PDRB (ADHK) 2019-2020 hanya tumbuh 0.45%, dimana pada tahun 2019 tumbuh pada angka 6.75%. demikian halnya dengan pertumbuhan angka PDRB ADHB tahun 2020 yang berada pada angka 1.04%, yang pada tahun 2019 lalu mampu berada pada posisi tumbuh 9.02%.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palopo dalam meningkatkan nilai/ angka PDRB :

- a. Mempermudah dan menyederhanakan perizinan daerah sehingga lebih cepat, lebih mudah dan lebih jelas, sehingga mampu mewujudkan peningkatan nilai investasi daerah.
- b. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja melalui pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja sehingga SDM lebih produktif.
- c. Meningkatkan sector sector produktif daerah
- d. Mengakselerasi infratstruktur daerah yang mendukung sector sector ekonomi daerah. (hulu-hilir)
- e. Menegakkan upah dan gaji buruh sesuai UMP
- f. Mengakselerasi sector swasta dan dunia usaha melalui stimulant dan fasilitasi agar berkembang.
- g. Menciptakan dukungan infrastruktur baik secara fisik, non fisik maupun dari SDM yang akan digunakan dalam berbagai bidang

Mengendalikan Jumlah Penduduk

1. Pemerintah Kota Palopo juga gencar melaksanakan program pengendalian jumlah penduduk, yakni program keluarga berencana yang diimplementasikan dalam program kampung KB. Sampai dengan tahun 2020, kampung KB sudah ada di 10 Kelurahan (20.41%), tahun 2019 hanya ada di 9 kelurahan. Kampung KB ini difokuskan pada wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi seperti di pesisir Kota Palopo, daerah dengan pemukiman kumuh dan kantong kemiskinan.
2. Menekan laju pertumbuhan penduduk dimana pada tahun 2020, sebesar 2.17%, 2019 sebesar 2.18%, dimana pada tahun 2017 2.31%.

Penduduk Kota Palopo Tahun 2018-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2018	2019	2020
1	Jumlah	Jiwa	180.678	184.614	184,681
2	Laki-Laki	Jiwa	87.812	89.917	92,444
3	Perempuan	Jiwa	92.866	94.697	92,237
4	Pertumbuhan	%	2,13	2,18	2.17
5	Densitas	Jiwa/Km2	730	746	746
6	Sex Ratio	%	94,56	94,27	100.22

Sumber Data : Kota Palopo Dalam Angka Tahun 2020

Perbandingan Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Sasaran Sepuluh X

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2020, mengalokasikan dana sebesar 15.54 Milyar dan terealisasi sebesar Rp. 14.68 Milyar atau 94.45% dan kemudian berhasil merealisasikan target kinerja sebagaimana yang diperjanjikan tahun 2020 pada angka 114.24%. Kondisi ini belum lebih baik dibandingkan kinerja tahun 2019, dimana Pemerintah Kota Palopo mengalokasikan dana sebesar 9.91 Milyar dengan tingkat realisasi kinerja sasaran sebesar 116% dari target yang ditetapkan pada tahun 2020.

Tabel 3.3.43
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran X
dengan Kinerja Keuangan

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
114.24	94.45

Meski demikian, pada tahun 2020 dan 2019, Pemerintah Kota Palopo tetap berhasil menghasilkan realisasi kinerja yang lebih besar, dibandingkan realisasi keuangan

yang digunakan. Berikut adalah table program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran sembilan.

Tabel 3.3.44
Program dan Realisasi Keuangan Sasaran X

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	20,000,000	20,000,000	100
Program pengembangan industri kecil dan menengah	49,000,000	48950000	98.89
Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Potensi Daerah	72,816,500	72,813,600	99,9
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	91,460,020	91,255,000	99.78
Program Pengembangan Perikanan Budidaya	71,898,300	71,837,150	99.91
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	18,180,000	18,180,000	100
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	37,710,000	37,690,000	99.95
Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Pemasaran Hasil pertanian	691,429,835	624,747,150	90.36
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana DAK Bidang Pertanian	212,539,780	212,539,780	100
Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Pemasaran Hasil perkebunan	257,695,000	257,452,000	99.91
Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peterernakan	2,438,422,915	2,423,406,733	99.38
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	14,400,000	14,400,000	100
Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	921,320,000	896,200,000	97.27
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	651,900,000	642,650,000	98.58
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	42,966,400	41,766,400	97.21

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program Peningkatan Produktifitas Kawasan Hunian dan Lingkungan pemukiman	22,432,000	22,377,000	99.75
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	431,108,000	395,924,600	91.84
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil dan menengah	25,494,500	24,691,000	96.85
Program Pembinaan Pedagang	2,027,316,580	1,801,233,850	88.85
Program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	1,544,029,960	1,541,841,200	99.86
Program Keluarga Sejahtera	16,869,650	16,753,000	99.31
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Keluarga Berencana	3,220,530,000	2,772,920,865	86.1
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	70,109,020	69,532,100	99.18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi	2,592,718,774	2,560,964,158	98.78
Rata-rata Realisasi	15,542,347,234	14,680,125,586	94.45

Sasaran XI : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran ke sebelas sebesar 45,95 dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar 45,95 atau memiliki predikat Sangat Rendah. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasaran ke sebelas, nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian sasaran.

Tabel 3.3.45
Capaian Kinerja Indikator Sasaran XI

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET	REALISASI		
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	0,17	0,02	11,76	Sangat Rendah
	Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	2,82	2,26	80,14	Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				45,95	Sangat Rendah
NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN XI				45,95	Sangat Rendah

Sektor Pariwisata

Nilai atau angka kontribusi sektor pariwisata di Kota Palopo tahun 2020 yang dipungut oleh Dinas Pariwisata sebanyak Rp.49.680.000 atau sebesar 0.02% dari Total PAD Kota Palopo tahun 2020 sebesar Rp. 221.553.820.032,-.

Capaian ini berkontribusi 11,76% target tahun 2020 yang telah ditetapkan pada RP-JMD Kota Palopo. Capaian yang sangat rendah ini disebabkan karena adanya pandemic Covid-19 yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian termasuk sektor pariwisata.

Sektor Ekonomi Kreatif

Sementara nilai atau angka retribusi dari sektor ekonomi kreatif Kota Palopo sebesar Rp. 5.009.500.361,- atau sebesar 2,26% dari total PAD Kota Palopo. Capaian ini belum mencapai target tahun 2020 yaitu 2,82%. Tingkat capaian kinerja untuk indikator kontribusi ekonomi kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 80,14% atau Tinggi. Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2020 mengalokasikan belanja sebesar 58 Milyar yang dikelola beberapa perangkat daerah dengan realisasi kinerja keuangan 57.39 Milyar atau 98.96%. Jika persentase realisasi keuangan tersebut dibandingkan dengan realisasi tingkat pencapaian sasaran sepuluh yang berpredikat sangat rendah (45.95 %), maka dapat dikatakan, realisasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Palopo belum mampu mendongkrak sektor pariwisata dan sektor ekonomi

kreatif dengan adanya pandemic Covid-19.

Tabel 3.3.46
Pengukuran kinerja sasaran XI

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2019	Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja 2020 (%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target	Realisasi			
Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah	0,05	0,17	0,02	11,76	0,24	8,3
	Kontribusi ekonomi kreatif terhadap pendapatan asli daerah	3,76	2,82	2,26	80,14	2,88	78,47

Dari tabel 3.3.46 diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2020 untuk indikator kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah adalah 0,02. Capaian ini jauh dibawah target tahun 2020 yang telah ditetapkan di RPJMD yaitu 0,17. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 0,24, maka capaian ini hanya mencapai 8,3% dari target.

Untuk indikator yang kedua yaitu kontribusi ekonomi kreatif terhadap pendapatan asli daerah tahun 2020 realisasinya adalah 2,26. Capaian ini belum mencapai target tahun 2020 yang telah ditetapkan di RPJMD yaitu nilai 2,82, sehingga capaian kinerjanya adalah 80,14%. Namun capaian ini sedikit menurun dibandingkan capaian tahun 2019 yang berada pada 3,76.

Tabel 3.3.47
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran XI
dengan Kinerja Keuangan

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
45,95	98,96

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2020 mengalokasikan belanja sebesar Rp. 58.001.083.360 yang dikelola oleh tujuh perangkat daerah yaitu Dinas Pariwisata dan Ekraf, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM dengan realisasi

kinerja keuangan 57.396.781.398 atau 98,96 %.

Berikut adalah tabel program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran sembilan.

Tabel 3.3.48
Program dan Realisasi Keuangan Sasaran XI

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program pengembangan pemasaran dan kemitraan pariwisata	8,000,000	8,000,000	100.00
Program pengembangan destinasi pariwisata	22,900,000	22,600,000	98.69
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	1,500,000	1,500,000	100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pariwisata	255,870,000	253,880,000	99.22
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	6,600,000	6,600,000	100.00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	19,547,500	19,547,500	100.00
Program Pembinaan dan Pemasayarakatan Olah Raga	89,550,000	86,815,000	96.95
Program Pembangunan, Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	27,138,090	27,138,000	100.00
Program peningkatan pelayanan angkutan	938,786,700	938,770,500	99.99
Program pembangunan jalan dan jembatan	56,631,191,070	56,031,930,398	98.94
Rata-Rata Realisasi Keuangan	58,001,083,360	57,396,781,398	98.96



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palopo merupakan perwujudan pertanggungjawaban tahunan atas RPJMD Kota Palopo Tahun 2019-2023. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Palopo telah berakuntabilitas sebagaimana diamanahkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas kinerja ini telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras seluruh aparat Pemerintah Kota Palopo serta pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Kota Palopo sebagai kota maju, inovatif dan berkelanjutan pada tahun 2023. Pemerintah Kota Palopo secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran dan kegiatan dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan adalah sebesar 78,93% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Pemerintah Kota Palopo telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; mendorong percepatan proses pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan; meningkatkan profesionalisme aparatur pegawai pemerintah dan pengawasan; dan mengembangkan sistem informasi pengumpulan data kinerja dalam rangka penyempurnaan penetapan indikator kinerja.

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KOTA PALOPO



WALIKOTA PALOPO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H**
Jabatan : Walikota Palopo

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palopo, 04 Januari 2021

WALIKOTA PALOPO



Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH KOTA PALOPO**

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2021
Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)	1 Indeks Pembangunan Manusia (Point)	Point	78.4
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	2 Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	Tahun	10.45
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	3 Angka Harapan Hidup	Tahun	70.36
Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	4 Persentase Penduduk Miskin (%)	%	7.15
Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)	5 Indeks Daya Saing Infrastruktur (Angka)	Angka	82
Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	6 Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	%	0
Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	7 Indeks Layanan Jalan	%	67,95
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	8 Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	Ha	10
	9 Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	76.98
Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani (T.3)	10 Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	Nilai	68
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	11 Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai)	Nilai	80
	12 Level SPIP Daerah (Point)	Point	3
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	13 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	Point	81.28
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	14 Pertumbuhan PDRB (%)	%	7.18
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	15 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	9.03
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S.10)	16 PDRB per kapita (Juta/Tahun)	Juta/tahun	37.5
Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T.5)	17 Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB (%)	%	2.4
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	18 Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	%	0.19
	19 Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	%	2.84

PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2021

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	65.356.988.962
	Program Pengelolaan Pendidikan	65.294.617.962
	Program Pendidik dan tenaga Kependidikan	62.371.000
2	KESEHATAN	84.389.624.940
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	83.877.301.940
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.540.000
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	505.783.000
3	RSUD	118.901.593.390
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	118.901.593.390
4	PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	97.328.490.118
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.157.118.500
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.877.104.700
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	696.762.750
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3.653.000.000
	Program Penataan Bangunan Gedung	70.005.000.000
	Program Penyelenggaraan Jalan	15.436.024.668
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	95.934.000
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	407.545.500
5	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	2.376.680.452
	Program Pengembangan Perumahan	98.320.000
	Program Kawasan Permukiman	2.185.235.452
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	53.950.000
	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	39.175.000
6	BAPPEDA	1.364.837.500
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	648.800.000
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	716.037.500
7	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	466.742.750
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	466.742.750
8	DINAS PERHUBUNGAN	1.094.420.000
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.020.340.000
	Program Pengelolaan Pelayaran	74.080.000
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEBERSIHAN	16.299.541.660
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	26.200.000
	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	145.975.500
	Program Pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati (kehati)	2.999.527.050

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	13.100.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	49.899.000
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	20.075.000
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	41.395.000
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	28.454.000
	Program Pengelolaan Persampahan	12.974.916.110
10	DINAS PERTANAHAN	9.111.985.000
	Program Pengelolaan Izinlokasi	6.600.000
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	31.920.000
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	9.000.000.000
	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	60.345.000
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	8.100.000
	Program Penatagunaan Tanah	5.020.000
11	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	1.599.436.424
	Program Pendaftaran Penduduk	851.492.000
	Program Pencatatan Sipil	86.460.000
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	236.960.000
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	597.070.500
	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	14.409.000
	Program Perlindungan Perempuan	448.400.000
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	23.292.000
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	14.185.000
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	96.784.500
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	5.947.974.100
	Program Pengendalian Penduduk	35.000.000
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.888.314.100
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	24.660.000
14	DINAS TENAGA KERJA	527.799.200
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	188.199.200
	Program Penempatan Tenagakerja	216.300.000
	Program Hubungan Industrial	123.300.000
15	DINAS SOSIAL	5.898.626.000
	Program Pemberdayaan Sosial	178.200.000
	Program Rehabilitasi Sosial	236.696.250
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	5.266.984.000

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Program Penanganan Bencana	158.789.750
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	57.956.000
16	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	709.358.000
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	4.700.000
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	4.700.000
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	5.100.000
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro(UMKM)	437.843.000
	Program Pengembangan UMKM	108.850.000
17	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.110.406.000
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	41.400.000
	Program Promosi Penanaman Modal	153.733.000
	Program Pelayanan Penanaman Modal	592.700.000
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	322.573.000
18	DINAS KEBUDAYAAN	563.858.564
	Program Pengembangan Kebudayaan	381.926.090
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	27.978.000
	Program Pembinaan Sejarah	28.369.000
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	125.585.474
19	DINAS PEMUDA & OLAHRAGA	3.105.977.400
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.018.122.400
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.087.855.000
20	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.630.400.000
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.630.400.000
21	DINAS PEMADAM KEBAKARAN & PENYELAMATAN	1.412.186.260
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.412.186.260
22	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	3.033.366.490
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	112.800.000
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	952.892.490
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.325.000.000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	131.164.000
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	511.510.000
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	371.370.000
	Program Penanggulangan Bencana	801.619.000
24	SEKRETARIAT DAERAH	21.114.625.215
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	19.839.960.500

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.274.664.715
25	SEKRETARIAT DPRD	3.018.306.000
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Danfungsi DPRD	3.018.306.000
26	INSPEKTORAT DAERAH	2.112.570.000
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.082.820.000
	Program Perumusankebijakan, Pendampingan dan Asistensi	29.750.000
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.495.456.845
	Program Kepegawaian Daerah	2.271.309.500
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	13.165.152.050
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	10.811.352.050
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.353.800.000
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.492.558.200
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.492.558.200
30	DINAS KETAHANAN PANGAN	743.396.000
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	627.577.000
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	76.650.000
	Program Pengawasankeamanan Pangan	39.169.000
31	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK	104.689.750
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	80.889.750
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	23.800.000
32	DINAS KEARSIPAN	79.606.000
	Program Pengelolaan Arsip	44.856.000
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	34.750.000
33	DINAS KOMUNIKASI & INFORMASI	571.275.000
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.884.050.000
	Program Aplikasi Informatika	730.773.124
34	DINAS PERPUSTAKAAN	170.538.000
	Program Pembinaan Perpustakaan	170.538.000
35	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	5.922.046.450
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.775.291.750
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	185.325.000
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	328.887.700
	Program Pengendalian danPenanggulangan Bencana Pertanian	72.955.000
	Program Penyuluhan Pertanian	559.587.000
36	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	413.253.000
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	44.250.000
	Program Pemasaran Pariwisata	69.203.000
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	299.800.000

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
37	DINAS PERIKANAN	755.198.000
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	253.242.600
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	438.510.400
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	63.445.000
38	DINAS PERDAGANGAN	1.309.784.500
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	837.267.000
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	383.614.500
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	64.900.000
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	24.003.000
39	DINAS PERINDUSTRIAN	167.176.900
	Program Perencanaan Dan pembangunan Industri	113.376.900
	Program Pengendalian Izinusaha Industri Kabupaten/Kota	40.000.000
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	13.800.000
40	DINAS TRANSMIGRASI	93.692.000
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	93.692.000
JUMLAH PAGU BELANJA LANGSUNG		482.928.057.620



Palopo, 04 Januari 2020

WALIKOTA PALOPO

Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H